

**ANALISIS PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) 2017
TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi Di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Prengsewu)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**

Oleh :

Napsia

1451010222

Jurusan : Ekonomi Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/ 2018**

**Analisis Program Alokasi Dana (ADD) 2017
Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

(Studi Di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Prengsewu)

**Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**



Pembimbing I : Madnasir, S.E.,M.S.I.

Pembimbing II : Femei Purnamasari, S.E.,M.S.I.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/ 2019 M**

ABSTRAK

Alokasi dana desa merupakan satu aspek penting dari sebuah desa untuk menjalankan program-program dari pemerintah. Termasuk diantaranya adalah program untuk mensejahterakan masyarakat diwilayahnya. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas dan rumit. Maka rumusan masalah yaitu bagaimana prioritas dan dampak program Alokasi Dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam.?, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan program dan dampak ADD terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kecamatan Gading Rejo dalam perspektif ekonomi Islam. Kegunaan penelitian agar dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan yang diambil dan sebagai pedoman program ADD mendatang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif, cara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: observasi, wawancara, serta dokumentasi, populasi dalam penelitian adalah aparatur desa dan tokoh masyarakat di kecamatan Gading Rejo, dengan menggunakan metode purposive sampling.

Analisis penelitian ini yaitu dalam mendistribusikan ADD di kecamatan Gading Rejo sudah sebagian menggunakan asas adil dan merata di beberapa desanya. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat kesimpulan yaitu pelaksanaan ADD belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. ADD yang sangat minim-masing kekuatan seperti masalah ekonomi produktif yang belum terkelola dengan baik atau bahkan belum terprogram karena aparatur desa dan tokoh masyarakat lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang masih sangat kurang sedangkan itu menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Pembangunan yang sudah dilaksanakan dari ADD di kecamatan Gading Rejo yaitu membuat gorong-gorong, sumur bor, pembangunan sanitasi air bersih dan kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Kata kunci : ADD, Kesejahteraan, Dan Ekonomi Islm



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi

**: Analisis Program Alokasi Dan Desa (ADD) 2017
Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada
Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Prengsewu)**

Nama Mahasiswa

: Napsia

NPM

: 1451010222

Program Studi

: Ekonomi Syariah

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Madnasir, S.E., M.S.I

Femei Purnamasari, S.E.M., Si

NIP. 197504242002121001

NIP. 198405212015032004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Madnasir, S.E., M.S.I

NIP. 197504242002121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H Endro Suratin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Analisis Program Alokasi Dan Desa (ADD) 2017 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam"**
(Studi Pada Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Prengsewu Disusun oleh :
Napsia, NPM : 1451010222, Program Studi : Ekonomi Syariah. Telah diuji dalam
sidang monaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Senin, 17
Desember 2018.

TIM MONAQOSAH

Ketua Sidang : Dr. Moh. Bahrudin, M.A

Sekretaris Sidang : Dedi Satriawan, M.Pd

Penguji I : Syamsul Hilal, M.Ag

Pengjui II : Femei Purnamasari, S. E., M.Si

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Moh. Bahrudin, M.A
NIP. 195808241989031003

MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنِّ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah[767]. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.[767] Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa Malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa Malaikat yang mencatat amalan-amalannya. dan yang dikehendaki dalam ayat ini ialah Malaikat yang menjaga secara bergiliran itu, disebut Malaikat Hafazhah.[768] Tuhan tidak akan merobah Keadaan mereka, selama mereka tidak merobah sebab-sebab kemunduran mereka.¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2012), h.216

PERSEMBAHAN

Dengan rasa bangga dan syukur yang amat dalam kupersembahkan karya ini kepada :

1. Ayahanda Ahmad Sah Hariri dan Kamilah, yang selalu berdo'a, berjuang untuk keberhasilan ku memberi cinta dan kasih sayang serta mendidikku sehingga tahu artinya hidup dan bagai mana harus bersikap.
2. Buat kakak-kakak ku Habibi Madian Saputra dan Taufik Sholeh, terimakasih atas kasih sayang dan semangat.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Napsia dilahirkan di kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan, pada tanggal 29 November 1996 yang merupakan anak ke 4 dari 4 bersaudara, dari pasangan Bapak Ahmad Sah Hariri dan Kamilah.

Adapun pendidikan yang telah ditempuh yaitu:

1. Dimulai pada tahun 2002 penulis sekolah di SDN 1 Kecamatan Banjit, Kabupaten Waykanan
2. Tahun 2008 penulis sekolah di MTS Guppi Banjit Kabupaten Waykanan
3. Tahun 2011 penulis sekolah di MA Guppi Banjit Kabupaten Waykanan
4. Tahun 2014 Kemudian penulis melanjutkan di Universitas Islam Negri Reden Intan Lampung dengan konsentrasi jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dengan penuh harapan dapat bertambahnya ilmu pada diri penulis.

Bandar Lampung, 7 November 2018

Napsia
NPM.1451010222

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“Analisis Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2017 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam“ (Studi Di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Prengsewu)**. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah menegakkan kalimat Tauhid serta membimbing umatnya ke jalan yang penuh cahaya dan semoga kita termasuk kaum yang mendapat syafaatnya di hari akhir nanti, Amin.

Skripsi yang ditulis merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Atas terselesainya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya, Secara rinci penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Moh. Bahrudin, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Madnasir, S.E., M.Si. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi selama proses penulisan skripsi ini hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. IbuFemei Purnamasari, S.E.M.,Si selaku Pembimbing II yang membantu meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi selama proses penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Karyawan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama mejadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
5. Pimpinan dan karyawan perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi, data, dan lain-lain.
6. Aparatur desa dan tokoh masyarakat di kecamatan Gading Rejo yang sudah meluangkan waktu dan membantu penulis dalam memperoleh data untuk penelitian.

Akhir kata jika penulis ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun dan perlindungan-Nya. Semoga karya penulis dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 7 November 2018

Napsia

NPM.1451010222

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
F. Metode Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Alokasi Dana Desa	20
1. Pengertian Alokasi Dana Desa.....	20
2. Dasar Hukum Alokasi Tentang Alokasi Dana Desa	21
3. Maksud, Tujuan Dan Sasaran Alokasi Dana Desa.....	24
4. Program Alokasi Dana Desa	27
B. Konsep Kesejahteraan Masyarakat	33
1. Pengertian Kesejahteraan	34
2. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat	34
3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat.....	35

4. Kiat-Kiat Mencapai Kesejahteraan	40
5. Konsep Dan Faktor Kesejahteraan.....	40
C. Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam	42
1. Pengertian Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam.....	42
2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam.....	46
3. Konsep Ekonomi Islam Tentang Kesejahteraan	48

BAB III PENYAJIAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Profil Kecamatan Gading Rejo	60
2. Kondisi Demografis Kecamatan Gading Rejo.....	61
3. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Gading Rejo	68
B. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Gading Rejo	74

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Program ADD Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	95
B . Dampak ADD Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.....	99
C. Program ADD Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam	105

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel1.1 : Jumlah Populasi Penelitian	11
Tabel1.2 : Jumlah Sampel Penelitian.....	12
Tabel3.1 : Jumlah Penduduk Kecamatan Gading Rejo	60
Tabel3.2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	61
Tabel3.3 : Penduduk Berdasarkan Agama.....	62
Tabel3.4 : Fasilitas Berdasarkan Tempat Ibadah.....	62
Tabel3.5 : Berdasarkan Lembaga Pendidikan	63
Tabel3.6 : Sarana Kesehatan.....	65
Tabel3.7 : Kondisi Perekonomian.....	66
Tabel3.8 : Pendapatan Penduduk Tahun 2016.....	67
Tabel3.9 : Pendapatan Penduduk Tahun 2017.....	68
Tabel3.10 : Pola Konsumsi Masyarakat.....	69
Tabel3.11 : Tingkat Pendidikan Masyarakat	71
Tabel3.12 : Tingkat Kesehatan Masyarakat.....	72
Tabel3.13 : Tingkat Perumahan Masyarakat	73
Tabel4.1 : Indikator Sebelum Dan Sesudah Adanya Add	96

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran1 : Pedoman Wawancara

Lampiran2 : Foto Dokumentasi

Lampiran3 : Kartu Konsultasi

Lampiran4 : Surat Plagiatrisme



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami Skripsi ini, Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah **“Analisis Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2017 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Prengsewu)”** akan di uraikan istilah istilah diatas sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, dsb).¹
2. Program adalah seperangkat kegiatan yang akan dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang tersedia dan menghasilkan manfaat.²
3. Alokasi Dana Desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari hasil dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).³

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: GramediaPustakaUtama, 2011), Cet. Ke-1, h. 58.

²Malayu S.P. Hasibun, *Manajemen Dasar pengertian dan masalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h.91.

³Haw Widjaja, *Otonomi Daesa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.133

4. Kesejahteraan Masyarakat adalah salah satu kondisi terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan biaya kesehatan dan pendidikan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.⁴
5. Ekonomi Islam adalah ilmu tentang Muamalah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan berpedoman kepada kitab suci Al-Qur'an atau perintah Allah.⁵

B. Alasan Memilih Judul

Adapun beberapa alasan yang menyebabkan penulis tertarik dan memilih judul tersebut yaitu :

1. Alasan objektif

Dewasa ini adanya program alokasi dana desa menjadi isu sentral yang dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan.

2. Alasan Subjektif

Karena judul tersebut sesuai dengan spesialisasi keilmuan penulis yaitu jurusan ekonomi islam serta didukung oleh tersedianya literatur baik yang primer maupun skunder dan penelitian lapanggan yang menunjang dalam penelitian ini.

⁴Rudi Badarudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta:UUPSTIM YKPN,2012).H.145.

⁵Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2011),h. 17.

C. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan pada hakekatnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan keadilan sosial, politik, dan pembangunan ekonomi masyarakat. pembangunan tidak hanya dilihat dari segi pembangunan fisik sementara. Namun, mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan dibidang sosial, politik, ataupun pembangunan ekonomi masyarakat.⁶

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional riil dan meningkatkan produktifitas. Pembangunan ekonomi selalu tujuan untuk kesejahteraan masyarakat seluasluasnya. Dengan berdasarkan pendekatan bahwa pembangunan didasarkan pembangunan yang dilakukan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan bantuan pemerintah maka adanya keseimbangan kewajiban yang dilakukan bersama pemerintah dan masyarakat secara seimbang.

Pembangunan desa mengutamakan prinsip imbang kewajiban yang serasi antara keduanya, yaitu pemerintah memberi bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan. sedangkan masyarakat yang memberikan partisipasi dalam pembangunan berbentuk prakarsa dan swadaya gotong royong pada setiap pembangunan yang dilaksanakan.⁷

Alokasi dana desa seharusnya memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila pengelolaan perencanaan program tersebut sesuai

⁶Loncolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, (Yogyakarta, UUPSTIM YKPN, 2015), H. 31.

⁷Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI dan Bina Grafika, 1999), h.14

dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya alam sekitar sehingga potensi desa dapat dimanfaatkan dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. untuk itu pembangun pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki dengan aspirasi masyarakat prioritas peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan, untuk itu pemerintah membentuk Undang-undang NO.6 Tahun 2004 tentang desa. pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirnya Alokasi Dana Desa (ADD).⁸

Pelaksanaan bantuan alokasi dana desa dikecamatan gading rejo kabupaten prengsewu terdiri dari 23 desa yaitu: Wonodadi, Gading Rejo, Parerejo, Tulung Agung, Mataram, Tegaalsari, Tambah Rejo, Gading Rejo Utara, Bulukerto, Wates Timur, Blitarejo, Bulu Rejo, Yogyakarta, Wonosari, Kediri, Wates, Panjerejo, Wonodadi Utara, Tambah Rejo Barat, Gading Rejo Barat, Wates Selatan, Yogyakarta Selatan, Klaten, yang berjumlah 72.860 jiwa (tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh) jumlah penduduk. kondisi perekonomian dikecamatan gading rejo didominasi 70% (tujuh puluh persen) petani, pedagang wiraswasta dan PNS dan pensiunan sebesar 30% (tiga puluh persen) dikecamatan gading rejo ini mengalokasikan dana desa di setiap desa yang diketahui,

⁸Kansil dan cristine, *Pemerintah Daerah Di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h. 3

berkisar Rp.230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) s/d Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pertahun sudah termasuk anggaran untuk aparatur desa.

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dengan demikian pemerintah desa harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan Dana Desa sebagai stimulus pembangunan desa secara adil dan merata dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam membangun desa sangat penting dimana pemerintah adalah unit pelaksana utama dalam pembangunan yang akan dibantu oleh beberapa lembaga yang lain seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta Masyarakat Desa. Berkenaan dengan desentralisasi/otonomi maksud pemberian Dana Desa (DD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Melihat pada apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, program pembangunan dan pemberdayaanlah yang memang menjadi tujuan utamanya, dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan semestinya, yakni untuk pembangunan dan pemberdayaan. Maka dari itu, pemerintah desa harus kembali pada tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin desa, yakni diantaranya:

1. Membina kehidupan masyarakat desa.

2. Membina ekonomi desa.
3. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
4. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat, mereka menuturkan bahwa pemerintah desa telah melakukan program pembangunan infrastruktur didaerahnya. Pelaksanaan program pembangunan tersebut merupakan hasil dari musyawarah antar dusun, yang kemudian diajukan kepada pemerintah desa sebagai rencana pembangunan pedesaan. Pembangunan tersebut merupakan murni swasembada dari pemerintah desa, dan dengan adanya kegiatan pembangunan infrastruktur ini mereka menuturkan bahwa masyarakat tersebut merasa senang dan merasa terbantu dengan adanya kegiatan pembangunan. Akan tetapi Pada tahun 2015 sebelum pemerintah desa kecamatan gading rejo aliran Dana Desa (DD) secara keseluruhan program pemerintahan desa belum dapat berjalan dengan baik karena keterbatasan dana yang dimiliki, sehingga program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa belum dapat memberikan hasil yang maksimal kepada masyarakat dalam hal pemberdayaan yang tepat guna.

Beberapa program atau kebijakan pemerintah kecamatan gading rejo yang telah dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya adalah program pembangunan pengerasan jalan, pembangunan drainase, sumur bor dan pembangunan gorong-gorong. beberapa program yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya, seperti pengerasan jalan perlintasan ekonomi masyarakat dan pengadaan perpustakaan desa. Setelah dua tahun berturut pemerintah dapat menjalankan beberapa program secara maksimal dibandingkan dengan sebelum adanya dana desa sebagai

⁹ Akbar Prabawa , *pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa loalepu Kecamatan Tanggerang Kabupaten Kutai Kartanegara*, Jurnal Umum Pemerintah, Vol . 3 NO. 228 (Desember 2015)

pendorong pembangunan dan pemberdayaan. Arah kesejahteraan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat.¹⁰

Alokasi Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pemerintahan desa, pembangunan desa, dan kesejahteraan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa, untuk itu pembangunan desa yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah-masalah yang dihadapi, serta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. sebagaimana Allah SWT berfirman (Q.S. Ar-ra'd: 13: 11):

لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا

بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah [767]. Sesungguhnya Allah tidak merobah

¹⁰M. Suherman (Aparatur Desa Kecamatan Gading Rejo) Wawancara dengan Penulis, Rekaman Suara Padang Cermin, 15 juli 2018.

Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia

Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa Malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa Malaikat yang mencatat amalan-amalannya. dan yang dikehendaki dalam ayat ini ialah Malaikat yang menjaga secara bergiliran itu, disebut Malaikat Hafazhah.

Tuhan tidak akan merubah Keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka fokus utama dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana pelaksanaan program Alokasi Dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kecamatan gading rejo, Bagaimana dampak pelaksanaan program Alokasi Dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kecamatan gading rejo, dan bagaimana pelaksanaan serta dampak program ADD terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi, oleh karena itu dari latar belakang masalah diatas penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut kedalam skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Prengsewu)”.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prioritas Program Alokasi Dana Desa Di kecamatan Gading Rejo?

2. Bagaimana Dampak Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Gading Rejo?
3. Bagaimana Program Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Gading Rejo terhadap peningkatan kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui Prioritas Program Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Gading Rejo.
- b. Mengetahui Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Masyarakat Di Kecamatan Gading Rejo.
- c. Mengetahui Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Gading Rejo Menurut Perspektif Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

penelitian ini sebagai salah satu kontribusi terhadap tanggung jawab akademik dalam disiplin ilmu khususnya ilmu ekonomi dan bisnis islam. Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan dalam ilmu dan diharapkan sebagai literatur yang baru bagi daftar kepustakaan untuk memperkaya referensi karya ilmiah di Universitas Negeri Raden Intan Lampung.

b. secara praktis

- 1) Bagi penulis: menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian khusus yang berhubungan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat kecamatan gading rejo.

2)Bagi Mahasiswi dapat dijadikan sebagai informasi tentang kesejahteraanmasyarakat.

F. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian eksploratif yang biasanya lebih bersifat studi kasus. Jenis penelitian ini mempunyai proses yang lain dengan proses pada penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dimulai dengan adanya suatu masalah yang biasanya spesifik dan diteliti secara khusus sebagai suatu kasus yang akan diangkat ke permukaan tanpa adanya maksud untuk generalisasi.¹¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat *descriptive*. Penelitian *descriptive* adalah penelitian yang bertujuan memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.¹²

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu kelompok sosial individu atau masyarakat. Penelitian ini selain berjenis penelitian lapangan juga berjenis penelitian pustaka, yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dan memiliki relevansi dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.¹³

2. Sumber Data

¹¹Farouk Muhammad, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PTIK Press, 2003), h. 100

¹²Zulganef, *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 11

¹³Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 46

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Berdasarkan sumbernya data dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dalam penelitian yaitu peneliti terjun langsung kelapangan guna mendapatkan data secara langsung dari masyarakat dan aparaturnya.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli. Data sekunder bisa diperoleh dari instansi- instansi, perpustakaan, maupun dari pihak lainnya.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, maka untuk mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui survei dengan cara tatap muka, dan wawancara kepada Salah satu aparaturnya desa yang berada di kecamatan gading rejo. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku- buku yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa, jurnal, skripsi, serta data lainnya yang dapat membantu agar data menjadi relevan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik lapangan dan kepustakaan. Dalam penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca,

menelaah serta mempelajari berbagai bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

a. Metode wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal Jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam metode ini peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan yang kadang- kadang disertai jawaban- jawaban alternatif dari responden dengan maksud agar pengumpulan data dapat lebih terarah kepada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Dalam wawancara berstruktur, pewawancara terikat dengan daftar pertanyaan dan alternatif jawaban yang ditentukan. Wawancara dilakukan kepada salah satu aparatur desa yang berada di kecamatan gading rejo.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku yang berkaitan tentang masalah penelitian. Metode dokumentasi ini biasanya melalui hasil rekaman, dokumen, catatan harian, laporan, flashdisk, serta website resmi lainnya.

c. Observasi

Study yang sengaja dan sistematis tentang fenomena dan gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Dalam menggunakan observasi, teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung.¹⁴

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

populasi adalah semua individu untuk semua kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel yang hendak digeneralisasikan, populasi adalah keseluruhan objek penelitian, populasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.1. dibawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Populasi Penelitian

No	Desa	Jumlah Aparatur Desa	Jumlah Toko Masyarakat
1	Wonodadi	14 orang	20 orang
2	Gading Rejo	12 orang	26 orang
3	Parerejo	13 orang	24 orang
4	Tulung Agung	13 orang	27 orang
5	Mataram	10 orang	27 orang
6	Tegalsari	9 orang	26 orang
7	Tambahrejo	8 orang	20 orang
8	Gading Rejo Utara	7 orang	10 orang
9	Bulukerto	7 orang	11 orang

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Hlm.83

10	Wates Timur	9 orang	9 orang
11	Blitarejo	8 orang	12 orang
12	Bulurejo	9 orang	10 orang
13	Yogyakarta	7 orang	10 orang
14	Wonosari	13 orang	12 orang
15	Kediri	12 orang	15 orang
16	Wates	8 orang	15 orang
17	Panjerejo	9 orang	20 orang
18	Wonodadi Utara	10 orang	20 orang
19	Tambah Rejo Barat	11 orang	15 orang
20	Gading Rejo Barat	14 orang	25 orang
21	Wates Selatan	13 orang	30 orang
22	Yogyakarta Selatan	12 orang	24 orang
23	Klaten	8 orang	25 orang
	Jumlah	236 orang	433 orang

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Gading Rejo

terdiri dari aperatur desa 236 orang , tokoh masyarakat berjumlah 433 orang, jadi jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 669 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti untuk mewakili populasi yang telah ditetapkan dalam penelitian ini maka diperlukan sampel sebagai cerminan guna menggambarkan keadaan populasi dan agar lebih mudah

dalam melaksanakan penelitian, atau bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi itu.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan cara *sampling non random* atau *sampling non probabilitas* yaitu cara pengambilan sampel yang semua objek atau elemen populasinya tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Cara penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. pertimbangan tertentu misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti sehingga dalam penelitian ini aparatur desa dan tokoh masyarakat lah yang dianggap paling tahu apa yang kita harapkan tentang alokasi dana desa.

Kecamatan Gading Rejo terdiri dari 23 desa yang dijadikan populasi karena keterbatasan penulis dalam mengelola data maka, penulis tidak menggunakan data secara keseluruhan untuk diolah. Tetapi untuk objektivitas data maka penulis menggunakan perwakilan sampel setiap desa yaitu aparatur desa, tokoh masyarakat yang mewakili masyarakat. Sampel ini diambil karena perencanaan program Alokasi Dana Desa merupakan hasil dari kesepakatan antara aparatur desa dengan tokoh masyarakat, oleh karena itu sampel diambil, dapat dilihat dari tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2

Jumlah Sampel Penelitian

No	Desa	Jumlah Aparatur Desa	Jumlah Tokoh Masyarakat
1	Wonodadi	2 orang	2 orang
2	Gading Rejo	2 orang	2 orang
3	Parerejo	2 orang	1 orang
4	Tulung Agung	2 orang	3 orang
5	Mataram	2 orang	2 orang
6	Tegalsari	2 orang	2 orang
7	Tambahrejo	2 orang	3 orang
8	Gading Rejo Utara	2 orang	3 orang
9	Bulukerto	2 orang	3 orang
10	Wates Timur	2 orang	2 orang
11	Blitarejo	2 orang	3 orang
12	Bulurejo	2 orang	2 orang
13	Yogyakarta	2 orang	2 orang
14	Wonosari	2 orang	3 orang
15	Kediri	2 orang	2 orang
16	Wates	2 orang	2 orang
17	Panjerejo	2 orang	3 orang
18	Wonodadi Utara	2 orang	3 orang

19	Tambah Rejo Barat	2 orang	2 orang
20	Gading Rejo Barat	2 orang	1 orang
21	Wates Selatan	2 orang	2 orang
22	Yogyakarta Selatan	2 orang	2 orang
23	Klaten	2 orang	2 orang
	Jumlah	46 orang	52 orang

Sumber Data: Data Diolah Pada Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sampel yang diambil digunakan dalam penelitian ini jumlah aparatur desa 46 dan jumlah tokoh masyarakat 52 jdi keseluruhan sampel yg diambil berjumlah 98 orang responden.

5. Pengelolaan Data

Peneliti dalam mengelola datanya menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

- Aditing*(pemeriksaan data)yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau releven dengan masalah.
- Klasifikasi adalah pengelompokkan data sesuai dengan jenis dan penggolangannya setelah diadakan pengecekan.
- Interprestasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil presentase yang diperoleh melalui observasi sehingga memudahkan peneliti untuik menganalisa badan menarik kesimpulan.

6. Analisis data

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Pendekatan berfikir deduktif adalah berangkat dari fakta- fakta umum, peristiwa- peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta- fakta dan peristiwa- peristiwa yang umum, kongkrit, ditarik generalisasi- generalisasi yang mempunyai sifat- sifat khusus.

Penelitian kualitatif bersifat pemberian (*deskriptif*), artinya mencatat secara teliti segala gejala (*fenomena*) yang dilihat dan didengar serta dibacanya (via wawancara atau bukan, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dokumen resmi atau bukan, dan lain- lain).

G. Penelitian Terdahulu

Karya ilmiah dengan tema ADD dan kesejahteraan ada beberapa penulis temukan diantaranya:1. Skripsi dengan judul program alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dikabupaten Waykanan dalam perspektif ekonomi islam studi pada kecamatan negri besar, karya rosimawati, skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam tahun,2015 dimana focus kajiannya pada masalah bagaimana dampak positif dan negative ADD terhadap kesejahteraan pada kecamatan Negeri Besar.2 buku pedoman umum penyelenggaraan pemerintah desa PP RI nomor 22 tahun 2015, fokus kajian penelitian ini adalah kurangnya pedoman umum penyelenggaraan pemerintah desa.karya A.saibani.3

buku otonomi dan pembangunan daerah: Reformasi, perencanaan, strategi, dan peluang karya muderajad koncoro.Ph.d.,(Erlangga,Jakarta,2014) fokus kajian yaitu pada permasalahan perencanaan daerah di era otonomi, strategi pembangunan daerah, dan peluang pembangunan bisnis daerah.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Alokasi Dana Desa

1. Pengertian Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh peratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.¹⁵ Sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah NO. 43 tahun 2014 pasal 100 tentang belanja alokasi dana desa untuk ADD digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% dari ADD digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan membangun desa, pembinaan kemasayarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dan paling sedikit 30% dari jumlah anggaran yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan insentif, RT, RW.

2. Dasar Hukum Tentang Alokasi Dana Desa (ADD)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asasotonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerahdiarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakatmelalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran sertamasyarakat dalam pembangunan disegala bidang kehidupan.Selanjutnya, agar fungsi pemerintahan daerah terlaksana secaraoptimal, perlu diikuti dengan pemberian

¹⁵Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 ayat(1), h. 29

sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, disamping cukup kemampuan daerah sendiri dalam menggali sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan kekuatan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.¹⁶

Pengeluaran ADD mangacu pada asas:

a. Asas Merata

Asas merata merupakan besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM); dan

b. Asas Adil

Asas adil merupakan besarnya ADD berdasarkan nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, kemiskinan pendidikan dasar, kesehatan dll), selanjutnya disebut alokasi dana des proporsional. Besarnya persentase perbandingan antara asas merata dan adil sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diatas, adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah ADD dan besarnya ADD adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.¹⁷

Bagi Republik Indonesia sebagai negara kesatuan, istilah “Pemerintahan yang di desentralisasikan” merupakan alternatif istilah yang mungkin sesuai untuk desentralisasi kewenangan pusat kepada daerah. Hal ini berdasarkan pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi:

¹⁶Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalm Perspektif Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Ed. Ke-1, h. 176

¹⁷*Ibid*

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional; dan
- f. Agama.¹⁸

Pada pasal 10 ayat (3) tersebut menyatakan bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat menjadi urusan pemerintah daerah. Demikian pula masih dikenal adanya tugas dekonsentrasi maupun tugas pembantuan sebagai mana diatur dalam pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu: Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah diluar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat(3), Pemerintah dapat:

- a. Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
- b. Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah; atau
- c. Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.¹⁹

Mendesentralisasikan pemerintahan dari pemerintah pusat ke daerah lokal, distrik, dan masyarakat lokal, dapat menjadi alat efektif untuk mencapai tujuan pokok, visi pengembangan manusia yang terpelihara atau *sustainable human development*,

¹⁸Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 10 ayat (3).

¹⁹Ibid, pasal 10 ayat (5)

meningkatkan akses pelayanan publik dan pekerjaan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, serta dapat meningkatkan respon pemerintah.²⁰

Dalam kaitannya dengan topik bahasan pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), maka dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan ADD tersebut diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, keuangan desa dan aset desa, kesatu (Keuangan Desa, Pasal 71-75) bagian kedua (Aset Desa, Pasal 76-77)
2. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah²¹

3. Maksud, Tujuan dan Sasaran Alokasi Dana Desa

Pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa memiliki kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.²² Selain itu masyarakat desa memiliki beberapa hak untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya:

²⁰ Arifin P. Soeria Atmadja, *Op.cit*, h. 178

²² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 67 ayat (2) point (b),(d) dan (e), *op.cit*, h. 37

1. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
3. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
4. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di desa. Untuk mewujudkan apa yang menjadi kewajiban desa dan hak masyarakat desa tersebut maka sangat diperlukan tersedianya dana untuk itu.

Salah satunya yaitu Alokasi Dana Desa (ADD).²³

Adapun maksud, tujuan dan sasaran dari ADD yaitu:

1. Maksud

Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bantuan keuangan dari pemerintahan kepada pemerintah desa yang berasal dari anggaran pendapatan dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.²⁴

2. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pada pasal 19 disebutkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

²³Ibid, h. 38

²⁴Pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) (Selat panjang: Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa, 2014).

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosialbudaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat Desa melalui badan usaha milik desa (BUMD).

3. Sasaran

Sasaran utama Alokasi Dana Desa (ADD) adalah:

- a. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
- d. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pembagian alokasi dana desa berdasarkan azas adil dan merata, yaitu:

- a. Azas merata, yaitu Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebesar 60% (enam puluh peratus) yang dibagi merata kepada seluruh desa yang ada di kabupaten ;

b. Azas adil atau proporsional, yaitu Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebesar 40% (empat puluh persepatus) yang dibagi secara adil atau proporsional kepada desa berdasarkan:

1. Independen, yaitu:

- a. Kemiskinan;
- b. Pendidikan dasar;
- c. Kesehatan;
- d. Keterjangkauan desa.

2. Variabel tambahan, yaitu:

- a. Jumlah penduduk;
- b. Luas wilayah;
- c. Potensi ekonomi;
- d. Partisipasi masyarakat;
- e. Jumlah dusun, RW dan RT²⁵

4. Program Alokasi Dana Desa (ADD)

Program/perencanaan (*planning*) yaitu fungsi dasar (*fundamental*) manajemen, karena *organizing, staffing, directing, dan controlling* pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis, perencanaan ini ditunjukkan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya perubahan kondisi dan situasi. Hasil perencanaan baru akan diketahui pada masa depan. Agar resiko yang ditanggung itu relatif kecil, hendaknya semua kegiatan, tindakan, dan kebijaksanaan direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan ini adalah masalah memilih artinya

²⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Nomor 16 Tahun 2011, Pasal 25

memilih tujuan, dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada. Tanpa alternatif, perencanaan pun tidak ada. Perencanaan merupakan kumpulan dari beberapa keputusan.²⁶

Program dalam kamus besar besar bahasa indonesia diartikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usulan-usulan (dalam ketatanegaraan perekonomian) yang akan dijalankan pemerintah. Sedangkan menurut pendapat kunarjo program didefinisikan secara teknis sebagai kumpulan dari proyek-proyek yang mempunyai kaitan sasaran yang sama yang terdiri dari proyek-proyek.

Perencanaan menurut Williams, perencanaan adalah proses untuk mengantisipasi dan mengubah sesuatu yang belum terjadi, melihat jauh kedepan, mencari solusi yg optimal, yang dirancang untuk meningkatkan dan idealnya memaksimalkan manfaat pembangunan secara pasti dan yang akan menghasilkan hasil yang di prediksi.²⁷

Namun kita sebagai umat muslim memiliki pandangan yang lebih bijak dan relevan daripada pendapat pakar perencanaan tersebut. Islam mengajarkan kita tentang studi perencanaan secara terperinci dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber-sumber segala ilmu yang menjadi pedoman kita hidup, begitupun dengan perencanaan.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat diasumsikan bahwa program adalah seperangkat kegiatan yang akan dilakukan dengan penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia dan menghasilkan manfaat. Dalam merencanakan suatu program harus memiliki karakteristik antara lain, yaitu:

91 ²⁶ Malayu S.P. Hasibun, *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h.

²⁷ Abu Usman Abdurrahman, "Perencanaan dalam Kaidah Islam" (on-line) tersedia di: [http://ilamisione.Owrdpress/2013/01/11/perencanaan dalam kaidah islam/](http://ilamisione.Owrdpress/2013/01/11/perencanaan-dalam-kaidah-islam/) 14Juni 2017)

- (1) Program harus mempunyai batasan yang jelas serta sasaran yang dapat diukur.
- (2) Program harus dapat dipergunakan sebagai alternatif untuk mempertimbangkan setiap kegiatan dalam pencapaian sasaran.
- (3) Program dapat dihitung secara analisis cost benefit.

Jadi kecuali mempunyai sasaran yang jelas, program juga harus dapat diukur outputnya. Selain dari pada itu program sendiri terdiri dari bebrbagai macam, menurut munir, bahwa program tidak hanya mencakup pada bidang yang luas tetapi juga ruang lingkup, isi, durasi, kejelasan dan spesialisasi program input, kompleksita tujuan dan kebaruan program yang bermacam-macam:

a. Ruang lingkup

Program kemungkinan memiliki lingkup, daerah, kota, kelompok, atau terbatas pada tempat dn kelompok tertentu. Beberapa program mungkin terpancar pada beberapa tempat dengan perhatian pada suatu hal tertentu.

b. Ukuran (*size*)

Program dapat melayani sedikit atau ratusan atau mungkin ribuan bahkan jutaan orang.

c. Durasi

Program dapat berlaku dalam hitungan jam, hari, minggu, bulan, tahun atau mungkin tidak terbatas waktunya.

d. Kejelasan dan Spesifikasi Program Input

Biasanya program memiliki tingkatan kejelasan. Secara ekstern terdapat program-program tersebar, variabel lebih banyak dan kadang-kadang sulit untuk digambarkan.

e. Kompleksitas Tujuan

Beberapa program dimaksudkan untuk menghasilkan perubahan secara singkat dan jelas, sementara yang lain dengan tujuan yang lebih kompleks dan lebih sulit untuk didefinisikan dan diukur.

f. Kebaruan Program

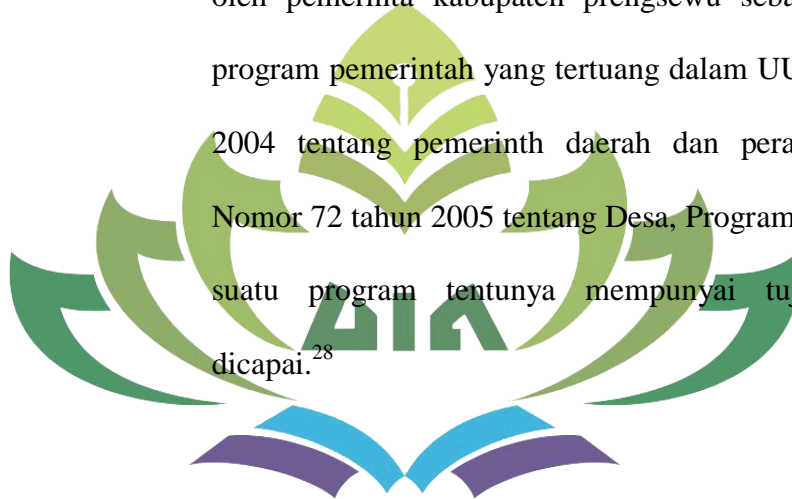
Program dikatakan inovatif bila program tersebut pada akhir pelaksanaannya mampu merubah secara karakteristik kebiasaan yang ada.

Model kesesuaian ini akan dapat berjalan dan berhasil seperti yang diharapkan, apabila didalam proses pelaksanaan terhadap program menurut kuncoro memenuhi tiga kriteria, yaitu:

- a. Proses pencarian ADD, yaitu kesesuaian antara apa yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok sasaran dengan apa yang di tawarkan oleh program ini, dimaksudkan bahwa kelompok sasaran akan mendapatkan manfaat dari apa yang ditawarkan oleh program, sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi.
- b. Pengalokasian ADD kesesuaian antara keputusan-keputusan organisasi pelaksanaan program dengan sasaran untuk mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan sasaran kelompok

sasaran untuk meminta pelayanan program , ini mengacu padrealisasi pelayanan program bagi kelompok sasaran, seperti kegiatan PKK. Pembinaan anak dan remaja, kegiatan gotong royong, belanja perlengkapan.

- c. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan berkesinambungan, dinamis, secara sinergis dan mendorong keterlibatan semua potensi, seperti partisipasi jaringan kerja dan keadilan. Prpgram ADD merupakan salah satu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten prengsewu sebagai implementasi program pemerintah yang tertuang dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerinth daerah dan peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Program ADD ini sebagai suatu program tentunya mempunyai tujuan yang akan dicapai.²⁸



B. Dampak

1. Pengertian Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.

²⁸ A.Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Bee Media pustaka,2015), h.58.

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu ;

1. Pengertian Dampak Positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak

membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

2. Pengertian Dampak Negatif

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.

Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

C. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan

kesejahteraan secara bahasa aman, sentosa, dan makmur. Sehingga kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran.²⁹ Kesejahteraan menurut ketenaga kerjaan menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmani dan rohani, baik maupun dari luar

²⁹ W.J.S. Purwadinata, *Pengertian Kesejahteraan Manusia*, (Bandung: Mizan, 1996),126.

hubungan pekerjaan, yang secara langsung atau tidak langsung atau dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.³⁰

Menurut kolle dalam bukunya bintarto, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan yaitu

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
- b. Dengan melihat kualitas dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.
- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
- d. Dengan melihat kualitas hidup dari spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.³¹

2. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

Menurut sudar sono, kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat dipersentasikan dari tingkat hidup masyarakat, tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentasnya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat.³²

Kesejahteraan sosial menurut UUD RI nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal (1) ayat 1, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya

³⁰ Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketana Kerjaan, Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 Angka 31.

³¹ Bintaro, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h.54.

³² Bahrudin, Rudy, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN 2012), H. 146

kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kebutuhan material merupakan kebutuhan materi seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan lainnya yang bersifat primer, sekunder, tersier. Adapun spiritual untuk memenuhi kewajiban beragama serta mencari arti dan tujuan hidup. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada masyarakat yang belum memperoleh pelayanan sosial dari pemerintah. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial dan sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.³³

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada umumnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain:

1. Sosial ekonomi rumah tangga masyarakat,
2. Struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi alasan dasar kegiatan produktifitas rumah tangga atau masyarakat.
3. Kondisi lembaga yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal regional dan global.

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materi dan hedonis, tetapi juga memasuki tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan bukan berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material duniawi, melainkan juga berorientasi pada kesejahteraan spiritual-ukhrowi.

³³ Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Jakarta: LP3ES, 1982).

3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran mencapai masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator-indikator kesejahteraan masyarakat menurut organisasi sosial dan menurut beberapa ahli.

a. indikator kesejahteraan meliputi:

a. Tingkat Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan

Pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya di alokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan kebutuhan lain yang bersifat material.

b. Komposisi Pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai

kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain.

Pendidikan sebagai lembaga konserlatif mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi sosialisasi
2. Fungsi pelestarian budaya
3. Fungsi kontrol sosial
4. Fungsi fungsi reproduksi budaya
5. Fungsi kultural
6. Fungsi modifikasi sosial³⁴

Menurut BPJS pendidikan dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu: angka atau huruf, anket partisipasi sekolah, pendidikan yang ditamatkan dan angka putus sekolah, dan pendidikan yang ditamatkan semakin baik dan semakin rendah putus sekolah semakin baik dan keadaan suatu daerah dan sejahtera, karena distribusi bantuan pemerintah merata.

d. Kesehatan

Dalam data kesehatan masuk dalam konsumsi rumah tangga berikut konsep dan definisi kesehatan menurut BPJs:

- 1) Keluhan kesehatan
- 2) Proses kelahiran
- 3) Kelahiran
- 4) Penolong kelahiran oleh petugas kesehatan

³⁴ Wujudji, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: P2LPTK, 1998). H. 31-42.

- 5) Imunisasi
- 6) ASI
- 7) Mengobati sendiri
- 8) Obat tradisional
- 9) Berobat jalan
- 10) Tidak termasuk obat jalan
- 11) Rawat inap

e. Perumahan dalam data statistik perumahan masuk dalam konsumsi rumah tangga, berikut konsep dan definisi perumahan menurut BPJS:

- 1) Bangunan fisik
- 2) Status penguasaan rumah

Dari pemikiran-pemikiran diatas maka pertumbuhan ekonomi yang berkualitas merupakan pertumbuhan yang sangat mendukung pembangunan manusia yang lebih tinggi. Indikator-indikator yang terus dikembangkan diharapkan mampu membawa korelasi positif pertumbuhan pembangunan harus fokus pada seluruh aset bangsa. Hasil dari pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata dan pelaksanaannya harus berdasarkan pengorganisasian kerja berkembang.

4. Kiat-Kiat Mencapai Kesejahteraan Masyarakat

Untuk mencapai kesejahteraan tidaklah gampang, dibutuhkan program-program yang bagus dalam menjalankannya. Dan salah satunya adalah program ADD, program ini adalah program yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang dititik beratkan pada pencapaian kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Berikut beberapa langkah yang ditempuh dalam mencapai hal tersebut antarlain:

- 1) Peningkatan kapasitas dan kelembagaannya.
- 2) Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
- 3) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal
- 4) Peningkatan kualitas dari kuantitas prasarana dan sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat.
- 5) Pengembangan jaringan kemitraan dalam masyarakat.

5. Konsep dan Faktor Kesejahteraan.

Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu. Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat. Kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, hanya yang lebih kecil harus dapat diterima atau diambil untuk menghindari bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

Adapun badan pusat statistik menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah:

1. Tingkat Pendapatan Masyarakat;
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan;
3. Tingkat Pendidikan;
4. Tingkat Kesehatan;
5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.³⁵

Hasil Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilakukan oleh BPS membuktikan bahwa semakin besar jumlah anggota keluarga semakin besar proporsi pengeluaran keluarga untuk makanan dari pada untuk bukan makanan. Ini berarti semakin kecil jumlah anggota keluarga, semakin kecil pula bagian pendapatan untuk kebutuhan makanan, dengan demikian jumlah anggota keluarga secara langsung mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga.³⁶ Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan antara lain:

1. Sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat,
2. Struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masyarakat.

³⁵ Buku Besar Data Dalam Angka dan Kalimat Badan Pusat Statistik (BPS), Teluk Betung, Lampung 2015, hlm 104.

³⁶ *Ibid*, hlm 108.

3. Potensi regional (sumber daya alam, lingkungan dan insfrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi.
4. Kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global.³⁷
- 5.

D. Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Kesejahteraan (falah) dalam Ekonomi Islam

Alfalah secara bahasa diambil darikata dasar *falah* yang bermakna *zharafa bima yarid* (kemenangan atas apa yang diinginkan), disebut *al-falah* artinya menang, keberuntungan dengan mendapatkan kenikmatan akhirat. Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surat AL-Mu'minin (23) ayat 1:



Rosulullah SAW bnersabda: telah menceritakan kepada kami Amru bin khalid berkata telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid dari Abu Al khair dari Abdullah bin Amru, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW islam manakah yang paling baik?

صَلَّى النَّبِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامَ قَالَ خَيْرٌ تُطْعَمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ لَمَعَرَفَتْ مَنْ تَعْرِفُ

Artinya: Nabi SAW menjawab “kamu memberi mkan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal “. (H.R. Bukhari)³⁹

Sedangkan menurut Prof. DR. Syaikh Muhammad Muhyiddin Qaradaghi, secara istilah *al-falah* berarti: kebahagiaan dan keberuntungan dalam kehidupan dunia

³⁷ *Ibid* hlm 114.

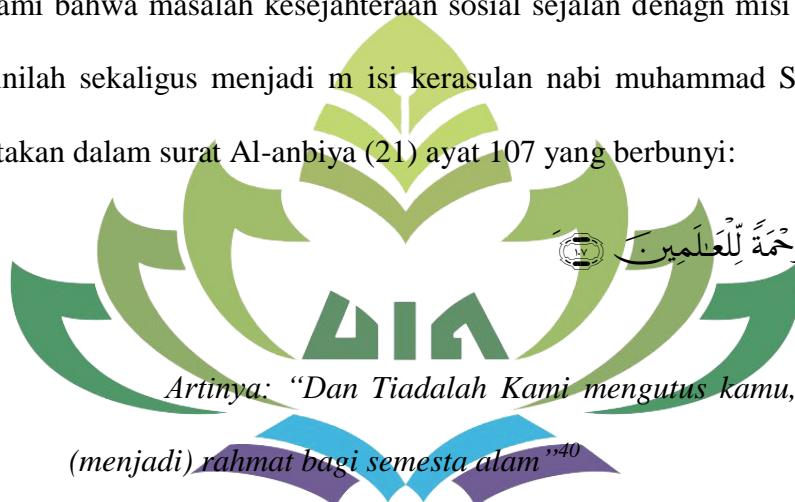
³⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*h. 342.

³⁹ Imam Bukhari, *kitab shahih Bukhari*, h. 15.

akhirat. Dilihat dari segala sisi dan dimensi (komprehensif) dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana yang terlihat dalam AL-Qur'an dan Sunnah.

Dari pengertian diatas, maka falah bisa diartikan segala kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, dan kesejahteraan yang dirasakan oleh seseorang, baik lahir dan batin, yang bisa mengukur tingkat kebahagiaan karena ia bersifat keyakinan dalam diri seseorang.

Sejahtera adalah aman, sentosa, damai, makmur, pengertian ini sejalan dengan Islam yang berarti selamat, sentosa, damai dan aman. Dari penegertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi islam itu sendiri.. misi inilah sekaligus menjadi misi kerasulan nabi muhammad SAW sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-anbiya (21) ayat 107 yang berbunyi:



Dari isi kandungannya bahwa tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad membawa agama islam bukan untuk membinasakan orang-orang kafir, melainkan untuk menciptakan perdamaian dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Perlindungan, kedamaian, dan kasih sayang yang lahir dari ajaran dan pengalaman islam yang baik dan benar.

Dalam ekonomi islam kesejahteraan merupakan terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, sanak keluarga

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*h. 331.

dan bahkan lingkungan. Hal ini sesuai dengan kesejahteraan surgawi dapat dilukiskan antara lain dalam peringatan Allah SWT kepada Adam.⁴¹

Ayat tersebut jelas bahwa sandang, pangan, papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang, dan kepanasan semuanya telah terpenuhi disana. Terpenuhi kebutuhan adalah unsur pertama kesejahteraan masyarakat.

Islam memandang kesejahteraan yang diperoleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan merupakan balas jasa atau usaha yang dilakukan dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang dimiliki. Jika faktor-faktor produksi tersebut dimanfaatkan secara optimal maka pendapatan masyarakat dapat ditingkatkan.

Menurut Yusuf Qardhawi, faktor produksi utama menurut Al-Qur'an adalah alam dan kerja manusia produksi merupakan perpaduan harmonis antara alam dengan manusia, sehingga pada akhirnya terbentuk masyarakat yang seimbang antara keadilan dan kesejahteraan masyarakat:

- a. Kesejahteraan masyarakat dimulai dengan islam yaitu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Tidak mungkin jiwa akan merasa ketenangan apabila kepribadian terpenuhi.
- b. Kesadaran bahwa pilihan Allah SWT apapun bentuknya, sekali usaha maksimal adalah pilihan terbaik yang selalu mengundang hikmah, karena itu Allah memerintahkan kepada manusia berusaha semaksimal mungkin, kemudian berserah diri kepadanya.

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 127.

- c. Menyisihkan sebagian hasil usahanya untuk menghadapi masa depan, sebagainya lain, (yang tidak mereka nafkahi itu) mereka tabung untuk menciptakan rasa aman menghadapi masa depan, diri, dan keluarga.
- d. Kewajiban bekerja, masyarakat atau mereka yang berkemampuan harus membantu menciptakan lapangan pekerjaan untuk setiap anggotanya yang berpotensi.
- e. Setiap insan harus memperoleh perlindungan, jiwa, harta, dan kehormatanny. Jangankan membunuh, mengejek, dengan sindiran halus, atau sambutan, yang tidak senonoh, berprasangka buruk tanpa dasar, mencari-cari kesalahan, dan sebagainya. Semuanya dilarang dengan tegas, karena semua itu dapat menimbulkan rasa takut tidak aman, maupun kecemasan yang mengantarkan kepada tidak terciptanya kesejahteraan masyarakat lahir dan batin yang di dambakan.⁴²

Dari definisi diatas maka kesejahteraan dalam pandangan islam bukan hanya dinilai dari ukuran material saja, tetapi juga dinilai dengan ukuran non material, seperti terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial dalam pandangan islam, masyarakat dikatakan sejahtera itu terpenuhinya dua kreteria pertama terpenuhinya kebutuhan pokok individu rakyat, baik pangan, sandang, papa, pendidikan maupun kesehatan. Kedua, terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, dan kehormatan Manusia.

Dalam konsep ekonomi islam, kesejahteraan dapat dikendalikan oleh distribusi kekayaan melalui zakat, infak dan sodaqoh, dengan penegendalian

⁴² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi mikro ISLAM*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 129-131.

distribusi kekayaan tersebut maka kebutuhan setiap individu seperti sandang, pangan, papan dapat terpenuhi secara kesinambungan sedangkan suatu keadaan terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Dengan demikian, kesejahteraan dalam ekonomi islam mencakup seluruh aspek kebutuhan jasmani dan rohani.⁴³

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi islam memberikan penjelasan bahwa kesejahteraan dilakukan melalui pemenuhan semua kebutuhan pokok manusia, menghapuskan semua kesulitan dan ketidak nyamanan, serta meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material

Adapun menurut Muhammad Abdul Mannan, ekonomi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.

Tujuan ekonomi islam menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Sebagai tatanan ekonomi, islam menganjurkan manusia bekerja dan berusaha. bekerja dan berusaha dilakukan oleh manusia diletakkan Allah pada timbangan kebaikan menurut teori islam, kehidupan-kehidupan terbagi menjadi dua unsur materi dan spritual yang satu sama lain saling membutuhkan antara lain:

a. Unsur materi

Kenikmatan yang disediakan Allah di bumi berupa rizki dan perhiasan. Islam memandang kehidupan dunia ini wajar, islam memperbolehkan manusia memanfaatkan nikmat dunia dan batas-batas yang halal-Nya dan yang haram Al-

⁴³ *Ibid, h. 10.*

Qur'an dan hadist menyebutkan sejumlah kehidupan yang baik, beberapa kenikmatan dalam kehidupan.

1. Nikmat makan dan minuman yang terdori dari kelezatan daging, buah, susu, madu, air, dan lain-lain.
2. Nikmat pakaian dan perhiasan.
3. Nikmat tempat tinggal
4. Nikmat kendaraan
5. Nikmat rumah tangga

b. Unsur Spiritual

Sesungguhnya pondasi kebahagiaan kehidupan terletak di kedamaian, kelapangan dada, dan ketenangan hati, jika manusia menginginkan kebahagiaan, maka sesungguhnya, ia tidak akan memperoleh dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya.⁴⁴ Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Hud ayat 61:

وَالِىْ ثَمُوْدَ اٰخَاهُمْ صٰلِحًاۙ قَالَ يَنْقُوْمِ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُۥ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ

فِيْهَاۙ فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تَوْبُوْا اِلَيْهِۚ اِنَّ رَبِّىْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌۭ

Artinya: "Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya

⁴⁴Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 64

*Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."*⁴⁵

3. Konsep Ekonomi Islam Tentang Kesejahteraan

Terdapat sejumlah argumentasi baik yang bersifat teologis normatif, maupun rasional filosofis yang menegaskan tentang betapa ajaran Islam amat peduli dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Pertama dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagai mana dikemukakan dalam Kamus Besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya, pengertian ini sejalan dengan pengertian Islam yang berarti selamat, sentosa, aman dan damai. Dari pengertiannya ini dapat diketahui bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri.

Kedua dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia (habl min Allah wa habl min al-Nas). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan ajuran melakukan amal salih yang didalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya ajaran Islam yang pokok yakni Tuguh Islam, seperti mengucapkan dua kalimah syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial.⁴⁶

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 228.

⁴⁶ Philipus M. Hadjon *Op.Cit.* h. 277

Orang yang mengucapkan dua kalimah syahadat adalah orang yang komitmen bahwa hidupnya hanya akan berpegang pada pentunjuk Allah dan Rasul-Nya, karena tidak mungkin orang mau menciptakan ketenangan, jika tidak ada komitmen iman dalam hatinya. Demikian pula ibadah shalat (khususnya yang dilakukan secara berjama'ah) mengandung maksud agar mau memperhatikan nasib orang lain. Ucapan salam pada urutan terakhir dalam tanyam dan berupaya mewujudkan kedamaian. Selanjutnya dalam ibadah puasa seseorang diharapkan dapat merasakan lapar sebagaimana yang biasa dirasakan oleh orang lain yang berada dalam kekurangan. Kemudian dalam zakat, tampak jelas unsur kesejahteraan sosialnya lebih kuat lagi. Demikian pula dengan ibadah haji, diharapkan agar ia memiliki sikap merasa sederajat dengan manusia lainnya.⁴⁷

Ketiga, bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan sosial, merupakan misi kekhilafahan yang dilakukan oleh Nabi Adam AS. sebagaimana disebutkan H.M. Quraish Shihab dalam bukunya *Wawasan Al-Quran* (hal. 127), menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan al-Quran tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan istrinya, sesaat sebelum turunnya mereka melaksanakan tugas kekhilafahan di bumi. Seperti diketahui, bahwa sebelum Adam dan istrinya diperintahkan turun ke bumi, mereka terlebih dahulu ditempatkan di surga. Surga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa, sehingga bayang-bayang surga itu diwujudkan di bumi, serta kelak dihuninya secara hakiki di akhirat. Masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan.

⁴⁷ Mubyarto, *Reformasi Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: UII PRESS, 2000, h.7

Keempat, di dalam ajaran Islam terdapat pranat dan lembaga yang secara langsung berhubungan dengan upaya penciptaan kesejahteraan sosial, seperti wakaf dan sebagainya. Semua bentuk pranat sosial dan berupaya mencari berbagai alternatif untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Namun suatu hal yang perlu dicatat, adalah bahwa berbagai bentuk pranat ini belum merata dilakukan oleh ummat Islam, dan belum pula efektif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Hal ini mungkin disebabkan belum munculnya kesadaran yang merata serta pengelolaannya yang baik.⁴⁸

Kelima, ajaran Islam mengenai perlunya mewujudkan kesejahteraan sosial ini selain dengan cara memberikan motivasi sebagaimana tersebut di atas, juga disertai dengan petunjuk bagaimana seharusnya mewujudkannya. Ajaran Islam menyatakan bahwa kesejahteraan sosial dimulai dari perjuangan mewujudkan dan menumbuhkan suburkan aspek-aspek akidah dan etika pada diri pribadi, karena dari diri pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat yang seimbang. Masyarakat Islam pertama lahir dari Nabi Muhammad SAW, melalui kepribadian beliau yang sangat mengagumkan.

Pribadi ini melahirkan keluarga yang seimbang seperti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra, dan lain-lain. Selain itu ajaran Islam menganjurkan agar tidak memanjakan orang lain, atau kreatifitas orang lain, sehingga orang tersebut tidak dapat menolong dirinya sendiri. Bantuan keuangan baru boleh diberikan apabila seseorang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Ketika seseorang datang kepada Nabi SAW. mengadukan kemiskinannya, Nabi SAW tidak memberinya uang, tetapi kapak agar digunakan

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta : Gema Insani Press, 1995, h.32

untuk mengambil dan mengumpulkan kayu. Dengan demikian, ajaran Islam tentang kesejahteraan sosial ini termasuk di dalamnya ajaran Islam tentang kesejahteraan sosial.⁴⁹

Konsep ekonomi Islam, terdapat satu titik awal yang harus kita perhatikan, yaitu ekonomi Islam sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari syari'atnya. Syari'at tersebut merupakan hukum atau ketetapan-ketetapan Allah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Menurut Muhammad bin Abdullah Arabi, ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang kita ambil dari AL-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad SAW dan pondasi ekonomi yang kita bangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.⁵⁰ Adapun menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁵¹

As-Syathibi mengatakan bahwa penetapan hukum-hukum syara' selalu berorientasi pada kepentingan hidup manusia. Kepentingan atau kebutuhan hidup manusia itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

1. Prioritas pertama: "*Ad-Dharuriyat*" ialah kebutuhan pokok, yakni kebutuhan pangan, sandang, perumahan atau papan, dan semua kebutuhan pokok yang tidak dapat dinilai dari kehidupan minimum. *Dharuriyyat* (kebutuhan pokok) merupakan tujuan yang harus ada dan mendasar bagi penciptaan kesejahteraan di dunia dan di akhirat, yaitu mencakup terpeliharanya lima elemen dasar

⁴⁹ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm.7

⁵⁰ Lukman Hakim, 2012, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, h.10

⁵¹ *Ibid*, hlm, 189.

kehidupan yakni jiwa, keyakinan atau agama, akal/intelektual, keturunan dan keluarga serta harta benda. Jika tujuan *daruriyyah* diabaikan, maka tidak akan ada kedamaian, yang timbul adalah kerusakan (*fasad*) didunia dan kerugian yang nyata di akhirat.

2. Prioritas kedua: "*Al-Hajiat*" ialah kebutuhan-kebutuhan yang wajar, seperti kebutuhan penerangan, kebutuhan pendidikan, dana lain sebagainya. Kebutuhan sekunder, yakni kebutuhan manusia untuk memudahkan kehidupan, agar terhindar dari kesulitan. Kebutuhan ini tidak perlu dipenuhi sebelum kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan inipun masih berkaitan dengan lima tujuan syariat. Syari'ah bertujuan memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesempitan. Hukum syarah dalam kategori ini tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi melainkan menghilangkan kesempitan dan berhati-hati terhadap lima hal pokok tersebut.⁵²

3. Prioritas ke tiga: "*At-Tahsiniyat*" atau dapat disebut juga sebagai kesempurnaan yang lebih berfungsi sebagai kesenangan akhirat dari pada kesenangan hidup yaitu kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan ini tergantung pada bagaimana pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder serta berkaitan dengan lima tujuan syariat. Syariah menghendaki kehidupan yang indah dan nyaman didalamnya. Terdapat beberapa provisi dalam syariah yang dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan yang lebih baik, keindahan dan simplifikasi dari *daruriyyah* dan *hajiyyah* Imam Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi

⁵²Nurul Huda, *Ekonomi Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta : Kencana, 2009 h.1

kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartite meliputi: kebutuhan (dharuriyat), kesenangan atau kenyamanan (hajiyat), dan kemewahan (tahsiniyat).⁵³ Imam Al-Ghazali, seperti halnya juga As-Syathiby, berpendapat bahwa yang jelas masuk dalam kategori Ad-Dharuriyyat yang menjadi prioritas garapan Islam adalah yang menjaga kemaslahatan:

- a) *Ad-din* (agama);
- b) *An-nafs* (jiwa);
- c) *Al-'Aql* (akal/pikiran);
- d) *An-nasl* (keturunan);
- e) *Al-mal* (harta benda).⁵⁴

4. *Kamili* yaitu disebut juga sebagai pelengkap yang lebih berfungsi sebagai kesenangan dunia yaitu kebutuhan yang dapat memuaskan keinginan yang lebih. Pemenuhan kebutuhan ini tergantung pada bagaimana pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder.⁵⁵

Lima masalah tersebut dikenal dengan istilah lima kebutuhan dasar (ad-dharuriyat al-khoms). Dalam hubungan konsep tersebut diatas, dapat dipahami lebih lanjut mengapa Islam melarang perbuatan-perbuatan kufur, kemaksiatan, pembunuhan, zina, pencurian, dan mabuk-mabukan. Karena perbuatan semacam itu mengancam kemashalatan dan pelastarian lima kebutuhan dasar tersebut. Demikian pula Islam memerintahkan usaha-usaha yang dapat menanggulangi

⁵³ *Ibid*, h.189

⁵⁴ *Ibid*, h.165.

⁵⁵ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.89.

kemiskinan melalui kerja keras, pemerataan, kemakmuran dengan cara menunaikan zakat, wakaf, shadaqah, hibah, waris, wasiat, dan lain sebagainya agar tidak terjadi akumulasi kekayaan hanya pada beberapa orang kaya saja. Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkatan pertama, yaitu kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Namun demikian, Al-Ghazali menyadari bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar demikian cenderung fleksibel menguti waktu dan tempat dan dapat mencakup bahkan kebutuhan-kebutuhan sosio psikologis.⁵⁶

Kelompok kebutuhan kedua terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak fatal bagi lima fondasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran dalam hidup. kelompok ketiga mencakup kegiatan-kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja; meliputi hal-hal yang melengkapi, menerangi atau menghiasi hidup. Sistem kesejahteraan masyarakat dalam islam bukan sekedar bantuan keuangan atau apapun bentuknya.⁵⁷ Bantuan keuangan hanya merupakan satu dari sekian bentuk bantuan-bantuan yang anjurkan Islam. Kesejahteraan masyarakat dapat dimulai dari:

- a) Perjuangan mewujudkan dan membunuh suburkan aspek-aspek akidah dan etika pada diri pribadi, karena diri pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat seimbang. Masyarakat Islam pertama lahir dari Nabi Muhammad Saw, melalui kepribadian beliau yang sangat mengagumkan. Pribadi ini melahirkan keluarga seimbang khadijah, Ali Bin Abi Thalib, Fathimah Az-

⁵⁶*Ibid*, h.108

⁵⁷*Ibid*, h.193

Zahra', dan lain-lain. Kemudian lahir diluar keluarga itu Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. dan sebagainya, yang juga membentuk keluarga, dan demikian seterusnya. Sehingga pada akhirnya terbentuklah masyarakat yang seimbang antara keadilan dan kesejahteraan masyarakat.⁵⁸

- b) Kesejahteraan masyarakat dimulai dengan Islam yaitu penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Swt. Tidak mungkin jiwa akan merasakan ketenangan apabila kepribadian terpecah. Allah berfirman dalam surat Ad-Zumar ayat 29 :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا

يَعْلَمُونَ

Artinya : “Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-laki (budak) yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki (saja); Adakah kedua budak itu sama halnya? segala puji bagi Allah tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.”⁵⁹

⁵⁸Ibid, h.88

⁵⁹Ibid,

- c) Kesadaran bahwa pilihan Allah apapun bentuknya, setelah usaha maksimal adalah pilihan terbaik dan selalu mengandung hikmah. Karena itu Allah memerintahkan kepada manusia berusaha bermaksimal mungkin kemudian berserah diri kepada-Nya, disertai kesadaran bahwa:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلٍ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾

لَّيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾

Artinya : “Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira[1459] terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.”
(QS. Al-Hadiid : 22-23)⁶⁰

Ini dimulai dengan pendidikan kewajiban bagi setiap keluarga dan masyarakat, sehingga akhirnya terciptalah hubungan yang serasi diantara anggota masyarakat yang salah satu cerminannya adalah kesediaan

⁶⁰ Ibid,

mengeluarkan tangan sebelum diminta oleh yang membutuhkan, atau kesedian demi kepentingan orang banyak.

d) Setiap pribadi bertanggung jawab untuk mensucikan jiwa dan hartanya, kemudian keluarganya, dengan memberikan perhatian secukupnya terhadap pendidikan anak-anak dan istrinya baik dari segi jasmani dan rohani. Tentunya, tanggung jawab ini mengandung konsekuensi keuangan dan pendidikan.

e) Menyisihkan sebagian hasil usahanya untuk menghadapi masa depan. Sebagian lain (yang tidak meraka nafkahkan itu) mereka tabung guna menciptakan rasa aman menghadapi masa depan, diri, dan keluarga. Allah berfirman dalam surat An-Nisaa' ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”*⁶¹

f) Kewajiban timbal balik antara pribadi dan masyarakat, serta masyarakat terhadap pribadi. Kewajiban tersebut sebagaimana hal nya setiap kewajiban melahirkan hak-hak tertentu yang sifatnya adalah keserasian

⁶¹ *Ibid,*

dan keseimbangan diantara keduanya. Sekali lagi kewajiban dan hak tersebut tidak terbatas pada bentuk penerimaan maupun penyerahan harta benda. Tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan.

- g) Kewajiban bekerja, masyarakat atau mereka yang berkemampuan harus membantu menciptakan lapangan pekerjaan untuk setiap anggotannya yang berpotensi. Karena itulah monopoli dilarang-Nya jangankan didalam bidang ekonomi, pada tempat duduk pun diperhatikan agar memberi peluang dan kelapangan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ائْشُرُوا فَاَئْشُرُوا

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : *"Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujaadilah : 11).⁶²*

- h) Setiap insan harus memperoleh perlindungan jiwa, harta, dan kehormatannya. Jangankan membunuh atau mengejek dengan sindiran

⁶²Ibid,

halus, atau menggelari dengan sebutan yang tidak senonoh-nonoh, berprasangka buruk tanpa dasar, mencari-cari kesalahan, dan sebagainya. Kesemua ini terlarang dengan tegas, karena semua itu dapat menimbulkan rasa takut, tidak aman, maupun kecemasan yang mengantarkan kepada tidak terciptanya lahir dan batin yang didambakan. Dari beberapa definisi diatas maka kesejahteraan dalam pandangan islam bukan hanya dinilai dengan ukuran material saja; tetapi juga dinilai dengan ukuran non-material; seperti, terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya dinilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. Dalam pandangan islam, masyarakat dikatakan sejahtera bila dipenuhi dua kriteria: pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat; baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatannya. Kedua, terjaga dan terlindungnya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Dalam konsep ekonomi islam, kesejahteraan dapat dikendalikan oleh distribusi kekayaan melalui zakat, infak dan sodaqoh. Dengan pengendalian distribusi kekayaan tersebut maka kebutuhan setiap individu seperti: sandang, pangan, dan papan dapat terpenuhi secara berkeeseimbangan. Sedangkan suatu keadaan terjaga dan terlindungnya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Dengan demikian, kesejahteraan dalam ekonomi Islam mencakup seluruh aspek kebutuhan jasmani maupun rohani.⁶³

⁶³ Nurul Huda, *Op.Cit*, h. 484

BAB III

PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kecamatan Gading Rejo

Gading Rejo merupakan salah satu dari kecamatan Prengsewu yang terletak dengan ibu kota kecamatan berjarak kira-kira 10 km ke arah timur Prengsewu dan 35 km ke arah barat kota Bandar Lampung. Wilayah ini terdiri atas 23 pekon dengan penghasilan utama pertanian. Secara administratif luas wilayah kecamatan Gading Rejo adalah 85,71 km, dengan penghasilan utama dari pertanian, penduduknya sebagian besar berasal dari Jawa, maka banyak ditemukan pekon yang merupakan nama kota/kabupaten di Jawa seperti Blitarrejo (Blitar), Kediri, Wonosari, dan Yogyakarta.

Denah batas wilayah sebagai berikut

1. Sebelah utara: kecamatan Sukaharjo, Kabupaten Prengsewu dan kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran.
2. Sebelah selatan: kecamatan Waylima, Kabupaten Pesawaran.
3. Sebelah barat: kecamatan Prengsewu, Kabupaten Prengsewu.
4. Sebelah timur: kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.⁶⁴

⁶⁴Jauadi, Wawancara Dengan Penulis, Balai Desa, Bulu Rejo, 13 Juni 2018.

2. Kondisi Demografis Kecamatan Gading Rejo

a. Jumlah Penduduk Di Kecamatan Gading Rejo

Jumlah penduduk kecamatan Gading Rejo terdiri dari 72.860 (tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh) jiwa, dengan jumlah kepala keluarga dengan kepadatan 851 (delapan ratus lima puluh satu) jiwa/km. Adapun desa yang termasuk dikecamatan Gading Rejo yaitu:

Tabel 3.1

JumlahPenduduk Kecamatan Gading Rejo

NO	DESA	JUMLAH PENDUDUK
1	Wonodadi	10.081
2	Gading Rejo	5.431
3	Parerejo	4.246
4	Tulung Agung	4.242
5	Mataram	4.147
6	Tegalsari	4.056
7	Tambah Rejo	3.646
8	Gading Rejo Utara	3.339
9	Bulu kerto	3.305
10	Wates Timur	3.262
11	Blitarejo	2.764
12	Bulurejo	2.713
13	Yogyakarta	2.613
14	Wonosari	2.556

15	Kediri	2.161
16	Wates	2.060
17	Panjerejo	2.025
18	Wonodadi Utara	1.978
19	Tambah Rejo Barat	1.922
20	Gading Rrejo Timur	1.849
21	Wates Selatan	1.598
22	yogyakarta Selatan	1.568
23	Klaten	1.316
	Jumlah	72.860

Sumber: Monografi Kecamatan Gading Rejo 2018⁶⁵

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki-Laki	35.720	48,18%
2	Perempuan	37.140	51,82%
	Jumlah	72.860	100%

Sumber: Monografi Kecamatan Gading Rejo

Persentase penduduk yang berjenis kelamin laki-laki 48,18% dan berjenis kelamin perempuan 51,82%, hampir setara meskipun lebih banyak penduduk yang berjenis kelamin perempuan dibandingkan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki.

⁶⁵Jauadi, e-mail kepada penulis, 13 Juni 2018.

b. Penduduk Berdasarkan Agama

Jumlah penduduk berdasarkan agama dikecamatan gading rejo dapat dilihat dari tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 3.3

Penduduk Berdasarkan Agama

NO	Agama	Presentase
1	Islam	94%
2	Kristen	5%
3	Hindu/budha	1%

Sumber: Monografi Kecamatan Gading Rejo ⁶⁶

Berdasarkan keagamaan mayoritas penduduk kecamatan gading rejo beragama islam, adapun fasilitas atau tempat ibadah berdasarkan agama atau keyakinan sebagai berikut:

Tabel 3.4

Tempat Ibadah

No	Fasilitas	Jumlah
1	Masjid	67
2	Wihara	0
3	Gereja	5
4	Pura	0

Sumber: Monografi Kecamatan Gading Rejo 2018

⁶⁶Jauadi, e-mail kepada penulis, 13 Juni 2018.

c. Lembaga Pendidikan

Dikecamatan Gading Rejo memiliki lembaga pendidikan dari tingkat Paud,TK, SD, SMP, SMA, TPA, MI, MTS, kecamatan gading rejo memiliki lembaga pendidikan yang memadai untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5

Berdasarkan Lembaga Pendidikan

N o	Desa	TP A	PAU D	T K	S D	SM P	SM A	SM K	M TS	M A
1	Wonodadi	2	1	2	2			1	1	
2	Gading Rejo	2	1	2	2	5	2	3		1
3	Parerejo	3	1	3	2					
4	Tulung Agung	1	2		2				1	
5	Mataram	1	1		2	1				
6	Tegalsari	1	2		2	1	1			
7	Tambah Rejo	1	2		2					
8	Gading Rejo Utara	1	2		2					
9	Bulu kerto	1	2		2					
10	Wates	2	2		2					

	Timur									
11	Blitarejo	1	2	2	2	1	1			
12	Bulurejo	2	2	3	2			1		
13	Yogyakarta	2	2		2					
14	Wonosari	1	1	1	2		1		1	
15	Kediri	3	2		1					
16	Wates	1	1		2	2				1
17	Panjerejo	1	1		2		1			
18	Wonodadi Utara	2	2		2					
19	Tambah Rejo Barat	2	1		2					
20	Gading Rejo Timur	2	1		3					
21	Wates Selatan	2	2	1	2					
22	Yogyakarta Selatan	2	2	1	2					1
23	Klaten	2	2	1	2					
	Jumlah	38	37	16	46	10	6	5	3	2

Sumber: Monografi Kecamatan Gading Rejo 2018⁶⁷

d. Sarana kesehatan

Dikecamatan Gading Rejo sarana kesehatan di setiap desa kurang memadai, terbukti hanya ada 7 puskesmas dari 23 desa untuk pertolongan pertama masyarakat. Dan hanya ada 1 puskesmas dikecamatan gading rejo.

Adapun sarana kesehatan dikecamatan Gading Rejo dapat dilihat dari tabel 3.6 dibawah ini:

Tabel 3.6.

Sarana Kesehatan

NO	Jenis Prasarana	Jumlah
1	Puskesmas	1
2	Puskesmas	7

Sumber: Monografi Kecamatan Gading Rejo 2018⁶⁸

e. Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian masyarakat dikecamatan Gading Rejo Kabupaten Prengsewu didominasi pada sektor pertanian 70%, pedagang, wiraswasta, PNS, dan pensiunan sebesar 30%. Mayoritas pekerjaan masyarakat dikecamatan Gading Rejo adalah petani sawah belum dimanfaatkan secara optimal membuat produksi pertanian belum meningkat.

Dibidang ekonomi, masih sedikitnya lembaga perekonomian diwilayah kecamatan gading rejo yang terkait seperti: perdagangan, jasa dan industri kecil, atau UMKM, yang kurangnya kegiatan pembinaan kepada masyarakat. Perlunya

⁶⁷Jauadi, e-mail kepada penulis, 13 Juni 2018.

⁶⁸Jauadi, e-mail kepada penulis, 13 Juni 2018.

upaya dalam usaha-usaha untuk jasa, perdagangan, industri kecil dan menengah diharapkan dikembangkan lebih lanjut untuk menggerakkan roda perekonomian khususnya dikecamatan gading rejo.⁶⁹ Lebih jelasnya dapat dilihat kondisi perekonomian masyarakat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7

Kondisi Perekonomian

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah Persentase
1	Petani	40
2	Buruh Tani	30
3	Pedagang, Wiraswasta	17
4	PNS	13
	Jumlah	100

Sumber: Monografi Kecamatan Gading Rejo 2018⁷⁰

3. Kondisi Masyarakat Di Kecamatan Gading Rejo

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari berbagai indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran tercapainya kesejahteraan masyarakat, dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Berikut beberapa indikator kesejahteraan masyarakat kecamatan gading rejo kabupaten prengsewu.

1. Tingkat Pendapatan Masyarakat

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya

⁶⁹Hasil Wawancara Penulis Dengan Tokoh Masyarakat Desa Kecamatan gading rejo, 13 Juni 2018.

⁷⁰Jauadi, e-mail kepada penulis, 13 Juni 2018.

dialokasikan untuk konsumsi kebutuhan jasmani, kesehatan, maupun pendidikan, serta kebutuhan lain yang bersifat material.

Masyarakat kecamatan gading rejo kabupaten prengsewu mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan buruh tani, dikarenakan dikecamatan gading rejo memiliki lahan yang luas serta tanah yang subur untuk bercocok tanam.⁷¹ Adapun besaran pendapatan masyarakat kecamatan gading rejo menurut profesi sebagai berikut:

Tabel 3.8.

Pendapatan Rata-Rata Penduduk Tahun 2016

No	Jenis Profesi	Pendapatan Perbulan
1	Petani	Rp.1.000.000-Rp.1.500.000
2	Buruh	Rp.500.000-Rp.1.000.000
3	Pedagang	Rp.700.000-Rp.1.800.000

Sumber: Wawancara Kepala Desa Kecamatan Gading Rejo 2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan pendapatan masyarakat dengan pengelolaan alokasi dana desa tahun 2016. Pendapatan masyarakat tetap tidak mengalami perubahan secara signifikansi sekalipun ADD tiap tahun bertambah.

⁷¹Hasil Wawancara Penulis Dengan Tokoh Masyarakat Desa Kecamatan gading rejo, 13 Juni 2018.

Tabel 3.9

Pendapatan Rata-Rata Penduduk

No	Jenis Profesi	Pendapatan Perbulan
1	Petani	Rp.1000.000-Rp.1.800.000
2	Buruh	Rp. 500.000-Rp.1.500.000
3	Pedagang	Rp. 500.000-Rp. 1.900.000

Sumber: Wawancara Kepala Desa Kecamatan Gading Rejo 2018⁷²

Dari kedua tabel diatas terlihat bahwa kenaikan pendapatan penduduk dikecamatan gading rejo tidak mengalami peningkatan yang besar, ini menunjukkan alokasi dana desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat dikecamatan gading rejo kurang baik dalam pembuatan program dan pengelolaannya.

2. Komposisi Pengeluaran Masyarakat

Rumah tangga merupakan konsumen atau pemakai barang dan jasa sekaligus sebagai penyedia faktor-faktor produksi tenaga kerja, lahan, dan modal. Konsumsi yang dilakukan oleh konsumen dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Pada tingkat pendapatan yang rendah, pengeluaran konsumsi umumnya dibelanjakan untuk kebutuhan pokok guna memenuhi kebutuhan jasmani. Keanekaragaman pengeluaran masyarakat tergantung pada tingkat pendapatan, tingkat pendapatan yang berbeda mengakibatkan perbedaan taraf konsumsi.

⁷²Hasil Wawancara Penulis Dengan Kepala Desa Kecamatan gading rejo, 25 Juni 2018.

Menurut perhitungan Biro Pusat Statistik (BPS) konsumsi masyarakat meliputi seluruh pengeluaran rumah tangga, baik makanan, perumahan, pakaian, pendidikan, maupun kesehatan. Berdasarkan jenis konsumsi masyarakat tersebut, yang menjadi kebutuhan terpenting adalah konsumsi makanan karena merupakan pemenuhan kebutuhan utama dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Menurut wawancara yang telah penulis lakukan dengan kepala desa dikecamatan gading rejo kabupaten prengsewu, kebutuhan konsumsi setiap hari tidak selalu sama, penghasilan tidak menentu menjadi salah satu faktor berapa porsi pengeluaran perharinya. Jika pendapatan masyarakat tinggi maka konsumsi masyarakat akan tercukupi dengan baik, akan tetapi jika pendapatan masyarakat sedikit maka hanya untuk kebutuhan pangan saja. Umumnya pengeluaran untuk konsumsi berkisar Rp.30.000 perhari ini belum termasuk biaya pendidikan, kesehatan, pajak bumi dan bangunan, kendaraan bermotor dan sebagainya.

Tabel 3.10

Pola Konsumsi ahun

No	Pola Konsumsi	Pengeluaran Perbulan
1	Pengeluaran Makanan	RP.800.000
2	Pengeluaran Pendidikan	Rp.500.000
3	Pengeluaran Kesehatan	Rp.200.000
	Total Pengeluaran	RP.1.500.000

Sumber: Hasil Kesimpulan Wawancara Kepala Desa Gading Rejo 2018⁷³

Tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pengeluaran konsumsi makanan masih lebih besar dibandingkan konsumsi pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat masih bergelut untuk memenuhi kebutuhan makanan. Sehingga masyarakat kecamatan gading rejo harus mencari pekerjaan tambahan untuk meningkatkan pendapatan.

3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah suatu bimbingan untuk mengembangkan potensi untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan agar cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya dan tidak tergantung pada orang lain. Pendidikan dapat diperoleh melalui lembaga-lembaga formal maupun non-formal.

Masyarakat kecamatan gading rejo jika ditinjau dari latar belakang pendidikan sudah menerapkan wajib belajar 9 tahun, bahkan ada juga yang melanjutkan kejenjang SMA, dan strata satu (S1). Tetapi hampir dari masyarakat kecamatan gading rejo berpendidikan SMA.⁷⁴ Faktor anak sekolah dikarenakan para orang tua tidak menganjurkan dan juga tidak ada keinginan dari anak untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi, mereka hanya cepat-cepat mencari pekerjaan untuk membantu ekonomi keluarga.

⁷³Hasil Wawancara Penulis Dengan Kepala Desa Kecamatan gading rejo, 25 Juni 2018.

⁷⁴Hasil Wawancara Penulis Dengan Kepala Desa Kecamatan gading rejo, 25 Juni 2018.

Tabel 3.11**Tingkat Pendidikan Masyarakat**

NO	Keterangan	Jumlah dalam %
1	Penduduk usia tahun keatas yang buta	0
2	Penduduk tidak tamat SD/ sederajat	2
3	Penduduk tamat SD/ sederajat	20
4	Penduduk tamat SMP/ sederajat	25
5	Penduduk tamat SMA/ sederajat	46
6	Penduduk tidak tamat D-3	4
7	Penduduk tamat S-1	1
8	Penduduk tamat S-2	2
	Total	100

Sumber: Kesimpulan Wawancara Kepala Desa Kecamatan Gading Rejo⁷⁵

Tinggi warga yang berlatar belakang SMA atau sederajat, membuat pengetahuan masyarakat, mengetahui pentingnya pendidikan. Akan tetapi, berpenghasilan rendah membuat warga takut untuk menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi . warga yang berpendidikan S1 diantaranya adalah anak-anak yang memiliki perkebunan luas dan pemilik kebun, PNS, dinas pendidikan atau guru SD.

⁷⁵Hasil Wawancara Penulis Dengan Kepala Desa Kecamatan gading rejo, 25 Juni 2018.

4. Tingkat Kesehatan Masyarakat

Untuk bidang kesehatan, indikator yang mewakili dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah umur harapan hidup waktu lahir. Namun jika ditanya lebih lanjut, bagaimana caranya meningkatkan umur harapan hidup sulit dijawab dengan pasti. Oleh karena itu, tampaknya diperlukan serangkaian indikator kesehatan yang lain yang diperkirakan berdampak pada kesehatan yang pada gilirannya meningkatkan umur harapan hidup waktu lahir.

Tabel 3.12

Tingkat Kesehatan Masyarakat

No	Indikator	Pertahun
1	Angka Kematian Bayi	1%
2	Angka Kematian Ibu	0
3	Angka Harapan Hidup	4%
4	Presentase Persalinan Oleh Tangan Medis	95%

Sumber: Kesimpulan Wawancara Kepala Desa Kecamatan Gading Rejo⁷⁶

Tabel diatas menunjukan Tingkat harapan hidup ketika lahir saat ini telah mengalami peningkatan yang signifikan, kesadaran masyarakat yang tinggi untuk mempercayakan masalah kesehatannya ke medis dalam proses kelahiran penduduk kecamatan gading rejo sudah sedikit menggunakan tabib (dukun bayi), penduduk sudah beralih kebidan, dan mudahnya akses jalan menuju puskesmas atau puskesmasdes,

⁷⁶Hasil Wawancara Penulis Dengan Kepala Desa Kecamatan gading rejo, 25 Juni 2018.

masyarakat yang sudah mengikuti kemajuan zaman serta mudahnya mengakses jaringan internet untuk mengetahui informasi tentang kesehatan.

5. Tingkat Perumahan Masyarakat

Rumah sebagai tempat bermukim dan melangsungkan kehidupan, juga sebagai tempat berlindung dan merupakan kebutuhan pokok tingkat dua (setelah makanan) yang mesti dicapai untuk tujuan keselamatan. Rumah pula sebagai pemisah antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain sehingga perumahan merupakan indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Penerangan di perumahan warga saat ini pun mayoritas telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangnya, tidak seperti sebelumnya yang menggunakan lampu minyak sebagai penerangan di malam hari disediakannya prasarana lingkungan seperti kelengkapandasar fisik, misalnya penyediaan air bersih, pembuangan sampah, tersedianya listrik, telpon jalan yang memungkinkan lingkungan pemukiman berfungsi sebagaimana mestinya.

Tabel 3.13

Tingkat Perumahan Masyarakat Tahun 2016-2017

No	Jenis Profesi	Tahun 2016	Tahun 2017
	Kepemilikan rumah	Hak milik	Hak milik
	Jumlah rumah per/KK	8.053	8.056
	Rumah berkualitas baik	60%	75%
	Rumah tangga mempunyai penerangan listrik	85%	90%
	Rumah tangga mempunyai MCK	50%	60%

	yang baik		
--	-----------	--	--

Sumber: Hasil Dari Kesimpulan Wawancara Kepala Desa Gading Rejo 2018⁷⁷

Dari tabel diatas jelas menunjukkn bahwa program alokasi dana desa berdampak positif jika dilihat dari jumlah rumah berkualitas baik yaitu naik sebesar 15%, sedangkan jika dilihat dari tingkat penerangan listrik naik sebesar 5%, tatapi belum berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat jika dilihat dari fasilitas MCK yang belum cukup memadai.

B. Hasil Analisis Wawancara

1. Program Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Gading Rejo

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di kecamatan Gading Rejo ini dikelola langsung oleh aparatur desa, kepala desa sebagai penanggung jawab program sedangkan sekertaris desa sebagai ketua pelaksanaan program untuk lebih jelasnya akan dipaparkan beberapa desa kecamatan Gading rejo program serta pengelolaan dimasing-masing desa:⁷⁸

1. Wonodadi

Luas wilayah diDesa Wonodadi 3.278 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh delapan) Ha, dengan kepala Bapak Priyono , terdiri dari 6 dusun dan 23RT, jumlah penduduk 10.081 (sepuluh ribu delapan puluh satu) jiwa. Desa ini pertahun mendapat besaran ADD sebesar Rp.253.325.000 (dua ratus juta lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima juta)

Proses penentuan program ADD di desa wonodadi ini, melalui proses musyawarah antara aparatur desa dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan

⁷⁷Hasil Wawancara Penulis Dengan Kepala Desa Kecamatan gading rejo, 25 Juni 2018.

⁷⁸Jauadi, e-mail kepada penulis, 13 Juni 2018.

aspirasi masyarakat didesa tersebut, jika program telah dimusyawarahkan serta disusun, dana desa sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT)

Besaran ADD tersebut digunakan untutk membiayai program-program yaitu pembangunan drainase 68 M gorong-gorong, pembinaan lembaga kemasyarakatan, kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, kegiatan fungsi aparatur pemerintah dan kegiatan sosialisasi susunan organisasi dana tata kerja sebesar Rp.101.325.000 atau kisaran 40% Belanja pegawai sebesar Rp.152.000.000 atau sebesar 60%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala Desa Wonodadi dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati prengsewu.

2. Gading Rejo

Luas wilayah di Desa Gading Rejo 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) Ha, dengan kepala Bapak Gunawan W Cahyo, terdiri dari 5 dusun dan 16 RT, jumlah penduduk 5.413 (lima ribu empat ratus tiga belas) jiwa. Desa ini pertahun mendapat besaran ADD sebesar 233.308.770 (dua ratus tiga puluh tiga ratus delapan tujuh ratus tujuh puluh)

Proses penentuan program ADD di Desa Gading Rejo ini, melalui proses musyawarah antara aparatur desa dan tokoh masyarakat dala, menyampaikan aspirasi masyarakat didesa tersebut, jika program telah dimusyawarahkan serta disusun, dana desa sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT)

Besaran ADD tersebut digunakan untuk belanja pegawai dan belanja operasional penyelenggaraan pemerintah Rp.135.319.000 atau sebesar 58%. Belanja modal, pembangunangorong-gorong, pembangunan rebet beton dusun, pembuatan sumur bor kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, kegiatan pembinaan kesenian serta sosial budaya masyarakat dan kelompok ini sebesar Rp.111.988.000 atau kisaran 42%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala Desa Gading Rejo dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati prengsewu.

3. Parerejo

Luas wilayah di Desa Parerejo 1.102 (seribu seratus dua) Ha, dengan kepala bapak Mustapa, terdiri dari 4 dusun dan 10 RT, jumlah penduduk 4.246 (empat ribu dua ratus empat puluh enam) jiwa. Desa ini tahun pertahun mendapat besaran ADD sebesar Rp.245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta)

Proses penentuan program ADD di desa parerejo ini, melalui proses musyawarah antara aparatur desa dan tokoh masyarakat dalam, menyampaikan aspirasi masyarakat didesa tersebut, jika program telah dimusyawarahkan serta disusun, dana desa sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

Besaran ADD tersebut digunakan untuk belanja pegawai, tunjangan operasional, operasional perkantoran dan listrik sebesar Rp.232.750.000 atau sebesar 95% , pembangunan gorong-gorong Rp.12.000.000 atau sebesar 5%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa parerejo dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati prengsewu.

4. Tulung agung

Luas wilayah di Desa Tulang Agung 1.457. (seribu empat ratus lima puluh tujuh) Ha, dengan kepala Bapak Jauadi , terdiri dari 4 dusun dan 13 RT, jumlah penduduk 4.242 (empat ribu dua ratus empat puluh dua) jiwa. Desa ini pertahun mendapat besaran ADD sebesar 234.325.000 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu).

Proses penentuan program ADD di desa parerejo ini, melalui proses musyawarah antara aparatur desa dan tokoh masyarakat dalam, menyampaikan aspirasi masyarakat didesa tersebut, jika program telah dimusyawarahkan serta disusun, dana desa sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

Besaran ADD tersebut digunakan untuk belanja pegawai dan pembuatan sumur bor sebesar Rp.140.595.000 atau sebesar 60% tunjangan operasional kegiatan pembinaan lembaga, kemasyarakatan, pembiayaan keamanan dan ketertiban sebesar Rp.93.730.000. Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa parerejo dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati prengsewu.

5. Mataram

Luas wilayah desa mataram 1.506 (seribu lima ratus enam) dengan kepala Bapak Pujorahayu, terdiri dari 5 dusun dan 15 RT, jumlah penduduk 4.147 jiwa. Desa ini pertahun mendapat besaran ADD sebesar 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta).

Proses penentuan program ADD di desa Mataram ini, melalui proses musyawarah antara aparat desa dan tokoh masyarakat dalam, menyampaikan aspirasi masyarakat didesa tersebut, jika program telah dimusyawarahkan serta disusun, dana desa sudah masuk rekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT)

Besaran ADD tersebut digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp.150.000.000. atau sebesar 60% tunjangan operasional, PKK, LPM dan penyelenggaraan perencanaan desa, Rp.95.000.000. atau sebesar 35%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa mataram dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati prengsewu.

6. Tegal sari

Luas wilayah di Desa Tegal sari 1.008 (seribu delapan) Ha, dengan kepala Bapak Bambang Setiawan terdiri dari 3 dusun dan 10 RT, jumlah penduduk 4.056 (empat ribu lima puluh enam) jiwa. Desa ini pertahun mendapat besaran ADD sebesar 252.000.000. (dua ratuslima puluh dua juta).

Proses penentuan program ADD di desa tambahrejo ini, melalui proses musyawarah antara aparat desa dan tokoh masyarakat dalam, menyampaikan

aspirasi masyarakat didesa tersebut, jika program telah dimusyawarahkan serta disusun, dana desa sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

Besaran ADD tersebut digunakan digunakan untuk membiayai program-program yaitu pembangunan drainase, pembuatan sumur bor, pembinaan lembaga kemasyarakatan, kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, sebesar Rp.151.000.000. atau kisaran 60%. kegiatan fungsi aparat pemerintah dan kegiatan sosialisasi susunan organisasi dana tata kerja Rp.101.000.000. atau kisaran 40%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa tegal sari dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati prengsewu.

7. Tambah Rejo

Luas wilayah di Desa Tambah rejo 908 Ha, dengan Kepala Bapak Sujadi, terdiri dari 3 dusun dan 8 RT, jumlah penduduk 3.646 jiwa. Desa ini pertahun mendapat besaran ADD sebesar Rp.234.300.000.

Proses penentuan program ADD di desa Tambah rejo ini, melalui proses musyawarah antara aparat desa dan tokoh masyarakat dalam, menyampaikan aspirasi masyarakat didesa tersebut, jika program telah dimusyawarahkan serta disusun, dana desa sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

Besaran ADD tersebut digunakan untuk tunjangan operasional BPD, operasional RT dan RW dan tunjangan kepala desa, perencanaan desa, dan perangkat sebesar . Rp.60.000.000 atau kisaran 30%, PKK dan LPM, belanja modal, dan

perencanaan desa sebesar Rp.164.000.000 atau sebesar 70%, desa ini memiliki penghasilan tetap sebesar 60%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa tambah rejo dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati prengsewu.

8. Gading Rejo Utara

Luas wilayah didesa Gading Rejo Utara 989 Ha, dengan kepala Bapak Giyatno, terdiri dari 5 dusun dan 18 RT, jumlah penduduk 3.339 jiwa. Desa ini pertahun mendapat besaran ADD sebesar 253.000.000.

Proses penentuan program ADD di Desa Gading Rejo Utara Ini, melalui proses musyawarah antara aparatur desa dan tokoh masyarakat dalam, menyampaikan aspirasi masyarakat didesa tersebut, jika program telah dimusyawarahkan serta disusun, dana desa sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT)

Besaran ADD tersebut digunakan untuk ganti ban motor dinas, administrasi dan pelaporan Rp.151.100.000 atau sebesar 60%, belanja modal, pembangunan rebet beton, kegiatan pembinaan lembaga masyarakat, dan kegiatan PKK sebesar Rp.101.000.000. atau sebesar 40%..

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Gading Rejo Utara dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati prengsewu.

9. Bulu kerto

Luas wilayah didesa bulu kerto 989 Ha, Dengan Kepala Bapak Saryanto, terdiri dari 4 dusun dan 13RT, jumlah penduduk 3.305 jiwa. Desa ini pertahun mendapat besaran ADD sebesar 247.000.000.

Proses penentuan program ADD di desa Bulu Kerto ini, melalui proses musyawarah antara aparatur desa dan tokoh masyarakat dalam, menyampaikan aspirasi masyarakat didesa tersebut, jika program telah dimusyawarahkan serta disusun, dana desa sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

Besaran ADD tersebut digunakan untuk belanja pegawai sebesar dan pelaporan sebesar Rp.145.000.000 atau atau kisaran 59% pembiayaan keamanan dan ketertiban serta kegiatan fungsi aparatur desa, PKK dan lembaga kemasyarakatan lainnya sebesar 90.879.000 atau sebesar 40%.Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa bulu kerto dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati prengsewu.

10. Wates timur

Luas wilayah didesa wates timur 1090 Ha, dengan kepala Bapak Jamhairi, terdiri dari 3 dusun dan 10 RT, jumlah penduduk 3.262 jiwa. Desa ini pertahun mendapat besaran ADD sebesar Rp.251.800.000.

Proses penentuan program ADD di Desa Wates Timur ini, melalui proses musyawarah antara aparatur desa dan tokoh masyarakat dalam, menyampaikan aspirasi masyarakat didesa tersebut, jika program telah dimusyawarahkan serta disusun, dana desa sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa

mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

Besaran ADD tersebut digunakan untuk belanja pegawai dan biaya listrik serta pergantian ban dinas dan pembuatan sumur bor Rp.176.000.000 atau sebesar 70%, belanja modal, ketentraman, kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga, kegiatan pelatihan peningkatan kinerja kader Posyandu sebesar Rp.65.000.000 26%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Wates Timur dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati prengsewu.

11. Blitarejo

Luas wilayah didesa 970 Ha, dengan Kepala Bapak Tukiyat, terdiri dari 3 dusun dan 10 RT, jumlah penduduk 2.764 jiwa, dan. Desa ini pertahun mendapat besaran ADD sebesar Rp.238.000.000.

Proses penentuan program ADD di desa Blitarejo ini, melalui proses musyawarah antara aparat desa dan tokoh masyarakat dalam, menyampaikan aspirasi masyarakat didesa tersebut, jika program telah dimusyawarahkan serta disusun, dana desa sudah masuk rekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT)..

Besaran ADD tersebut digunakan untuk tunjangan kepala desa dan pembuatan sumur bor sebesar Rp.178.500.000 atau kisaran 75% Belanja modal PKK dan LPM , serta penyelenggara kegiatan Rp.59.000.000 atau kisaran 25%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Blitarejo dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati prengsewu.

12. Bulu Rejo

Luas wilayah di Desa Bulu Rejo 978 Ha, dengan kepala bapak suherman, terdiri dari 2 dusun dan 6 RT, jumlah penduduk 2.713 jiwa. Desa ini pertahun mendapat besaran ADD sebesar Rp.250.000.000.

Proses penentuan program ADD di desa Bulu Rejo ini, melalui proses musyawarah antara aparatur desa dan tokoh masyarakat dalam, menyampaikan aspirasi masyarakat didesa tersebut, jika program telah dimusyawarahkan serta disusun, dana desa sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

Besaran ADD tersebut digunakan untuk belanja pegawai dan biaya listrik dan pembuatan sumur bor Rp.170.000.000 atau sebesar 70%, kegiatan pengadaan sarana dan prasaran olah raga, kegiatan pelatihan peningkatan kinerja kader Posyandu, PKK yang digunakan untuk pengajian sebesar Rp.65.000.000 atau sebesar 26%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Bulu Rejo dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati prengsewu.

13. Yogyakarta

Luas wilayah di Desa Yogyakarta 900 Ha, dengan kepala Bapak Hanafi, terdiri dari 3 dusun dan 8 RT, jumlah penduduk 2.163 jiwa. Desa ini pertahun mendapat besaran ADD sebesar Rp.248.000.000.

Proses penentuan program ADD Di Desa Yogyakarta ini, melalui proses musyawarah antara aparat desa dan tokoh masyarakat dalam, menyampaikan aspirasi masyarakat didesa tersebut, jika program telah dimusyawarahkan serta disusun, dana desa sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

Besaran ADD tersebut digunakan untuk belanja pegawai tunjangan kepala desa dan perangkat sebesar Rp.62.000.000 atau sebesar 25%, belanja modal dan pegawai, PKK, dan LPM, serta penyelenggaraan kegiatan 186.000.000 atau sebesar 75%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Yogyakarta dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati prengsewu.

14. Wonosari

Luas wilayah di Desa Wonosari 897 Ha, dengan kepala Bapak Arbi Nugroho, terdiri dari 4 dusun dan 10 RT, jumlah penduduk 2.556 jiwa. Desa ini pertahun mendapat besaran ADD sebesar Rp.232.000.000.

Proses penentuan program ADD di desa Wonosari ini, melalui proses musyawarah antara aparat desa dan tokoh masyarakat dalam, menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah dimusyawarahkan serta disusun, dana desa sudah masuk rekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

Besaran ADD tersebut digunakan untuk pembangunan fisik dan kegiatan ekonomi desa sebesar Rp116.000.000 atau kisaran 50%, sedangkan untuk 20% untuk belanja pegawai dan operasional BPD dan operasional RT, RW, serta memiliki penghasilan tetap sebesar 23%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Wonosari dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati Pongrengsewu.

15. Kediri

Luas wilayah di Desa Kediri 807 Ha, dengan kepala Bapak Jarwanto, terdiri dari 2 dusun dan 9 RT, jumlah penduduk 2.161 jiwa. Desa ini tahun 2017 mendapat besaran ADD sebesar Rp245.000.000.

Proses penentuan program ADD di desa Kediri ini, melalui proses musyawarah antara aparat desa dan tokoh masyarakat dalam, menyampaikan aspirasi masyarakat di desa tersebut, jika program telah dimusyawarahkan serta disusun, dana desa sudah masuk rekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

Besaran ADD tersebut digunakan untuk belanja pegawai, pembuatan gorong-gorong dan sumur bor sebesar Rp.147.000.000. atau sebesar 60% tunjangan operasional, dan penyelenggaraan perencanaan desa, kegiatan pembinaan lembaga, kemasyarakatan, sebesar Rp.85.000.0000 atau sebesar 35%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Kediri dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati prengsewu.

16. Wates

Luas wilayah didesa Wates 803 Ha, dengan kepala bapak suherman, terdiri dari 3 dusun dan 9 RT, jumlah penduduk 2.060 jiwa. Desa ini pertahun mendapat besaran ADD sebesar Rp.247.000.000.

Proses penentuan program ADD di desa Wates ini, melalui proses musyawarah antara aparatur desa dan tokoh masyarakat dala, menyampaikan aspirasi masyarakat didesa tersebut, jika program telah dimusyawarahkan serta disusun, dana desa sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

Besaran ADD tersebut digunakan untuk belanja pegawai dan belanja operasional dan pembuatan sumur bor penyelenggaraan pemerintah Rp.143.260.000 atau sebesar 58%. Belanja modal, pembangunan gorong-gorong Rp.103.000.000. atau kisaran 42%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa wates dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati prengsewu.

17. Panjerejo

Luas wilayah didesa Panjerejo 800 Ha, dengan kepala Bapak Agus Abidin, terdiri dari 2 dusun dan 11 RT, jumlah penduduk 2.025. Desa ini pertahun mendapat besaran ADD sebesar Rp.243.000.000.

Proses penentuan program ADD di desa Panjerejo ini, melalui proses musyawarah antara aparat desa dan tokoh masyarakat dalam, menyampaikan aspirasi masyarakat didesa tersebut, jika program telah dimusyawarahkan serta disusun, dana desa sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT)

Besaran ADD tersebut digunakan untuk belanja dan pembuatan sumur bor pegawai Rp.128.000.000 atau sebesar 53%. pembangunan rebet beton dusun, kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, kegiatan pembinaan kesenian serta sosial budaya masyarakat dan kelompok ini sebesar Rp.109.350.000. atau kisaran 42 %.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Panjerejo dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati prengsewu.

18. Wonodadi Utara

Luas wilayah didesa 789 Ha, dengan kepala bapak suherman, terdiri dari 2 dusun dan 8 RT, jumlah penduduk 1.978 jiwa. Desa ini pertahun mendapat besaran ADD sebesar Rp.233.000.000.

Proses penentuan program ADD didesa Wonodadi ini, melalui proses musyawarah antara aparatur desa dan tokoh masyarakat dalam, menyampaikan aspirasi masyarakat didesa tersebut, jika program telah dimusyawarahkan serta disusun, dana desa sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

Besaran ADD tersebut digunakan unttuk membiayai program-program belanja pegawai Rp.139.000.000 atau kisaran 60%. Serta kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan Rp.69.900.000.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Wonodadi dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati prengsewu.

19. Tambah Rejo Barat

Luas wilayah didesa Tambah Rejo Barat 89 Ha, dengan Kepala Bapak Kuncoro, terdiri dari 2 dusun dan 10 RT, jumlah penduduk 1.922 jiwa. Desa ini pertahun mendapat besaran ADD sebesar 236.800.000.

Proses penentuan program ADD di desa Tambah Rejo ini, melalui proses musyawarah antara aparatur desa dan tokoh masyarakat dalam, menyampaikan aspirasi masyarakat didesa tersebut, jika program telah dimusyawarahkan serta

disusun, dana desa sudah masuk rekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

Besaran ADD tersebut digunakan untuk membiayai program-program yaitu pembangunan drainase, kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, Rp.115.000.000. atau kisaran 48% Dan belanja pegawai, pengersan jalan Rp.122.000.000.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Tambah rejo dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati prengsewu.

20. Gading rejo timur

Luas wilayah di Desa Gading Rejo Timur 798 Ha, dengan Kepala Bapak Suandi, terdiri dari 2 dusun dan 9 RT, jumlah penduduk 1.849 jiwa. Desa ini tahun 2017 mendapat besaran ADD sebesar Rp.232.980.000.

Proses penentuan program ADD di desa Gading Rejo ini, melalui proses musyawarah antara aparat desa dan tokoh masyarakat dalam, menyampaikan aspirasi masyarakat didesa tersebut, jika program telah dimusyawarahkan serta disusun, dana desa sudah masuk rekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

Besaran ADD tersebut digunakan untuk Belanja modal, pembangunan gorong-gorong sebesar Rp.143.000.000atau kisaran 60% serta tunjangan kepala desa dan perangkat sebesar Rp.92.000.000.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Gadung Rejo dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati prengsewu.

21. Wates selatan

Luas wilayah didesa Wates selatan 908 Ha, dengan kepala Bapak Nugroho, terdiri dari 2 dusun dan 7 RT, jumlah penduduk 1.598 jiwa. Desa ini pertahun mendapat besaran ADD sebesar 234.500.000.

Proses penentuan program ADD di desa wates selatan ini, melalui proses musyawarah antara aparatur desa dan tokoh masyarakat dala, menyampaikan aspirasi masyarakat didesa tersebut, jika program telah dimusyawarahkan serta disusun, dana desa sudah masuk kerekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

Besaran ADD tersebut digunakan untuk belanja belanja operasional, pengerasan jalan dan pembuatan air bersih Rp. 142.000.000 atau sebesar 62%, kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, kegiatan pembinaan kesenian serta sosial budaya masyarakat dan kelompok ini sebesar Rp.93.000.000 atau kisaran 40%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Wates selatan dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati prengsewu.

22. Yogyakarta selatan

Luas wilayah didesa Yogyakarta Selatan 879 Ha, dengan Kepala Bapak Karyono, terdiri dari 3 dusun dan 9 RT, jumlah penduduk 1.568 jiwa. Desa ini pertahun mendapat besaran ADD sebesar Rp.234.000.000.

Proses penentuan program ADD di desa Yogyakarta selatan ini, melalui proses musyawarah antara aparat desa dan tokoh masyarakat dala, menyampaikan aspirasi masyarakat didesa tersebut, jika program telah dimusyawarahkan serta disusun, dana desa sudah masuk rekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

Besaran ADD tersebut digunakan untuk belanja operasional Rp.133.380.000 atau sebesar 57%., pembangunan gorong-gorong dan pengerasan jalan kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan sebesar Rp.112.000.000 Atau Kisaran 40%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Yogyakarta selatan dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati prengsewu.

23. Klaten

Luas wilayah didesa Klaten 1002 Ha, dengan kepala Bapak Maryono, terdiri dari 2 dusun dan 6RT, jumlah penduduk 1.316 jiwa. Desa ini pertahun mendapat besaran ADD Rp.247.800.000.

Proses penentuan program ADD di desa Klaten ini, melalui proses musyawarah antara aparat desa dan tokoh masyarakat dalam, menyampaikan aspirasi masyarakat didesa tersebut, jika program telah dimusyawarahkan serta disusun, dana desa sudah masuk rekening desa maka perangkat desa mempunyai tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk membuat surat perintah pembayaran (SPT).

Besaran ADD tersebut digunakan untuk belanja pegawai dan biaya listrik sebesar. Rp.173.000.000 atau sebesar 70 % belanja modal dan pembangunan 64.000.000 atau sebesar 26%.

Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD ini yaitu kepala desa Klaten dalam bentuk pertanggung jawaban laporan keuangan alokasi dana desa kepada bupati prengsewu.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Prioritas Program Alokasi Dana Desa Masyarakat Di Kecamatan Gading Rejo

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus dan dibagi kesetiap desa secara propesional.⁷⁹

Sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah NO. 43 tahun 2014 pasal 100 tentang belanja alokasi dana desa untuk ADD digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% dari ADD digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan membangun desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dan paling sedikit 30% dari jumlah anggaran yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan insentif, RT, RW.

Pengeluaran ADD mangacu pada asas:

a. Asas Merata

Asas merata merupakan besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM); dan

⁷⁹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) point (d)

b. Asas Adil

Asas adil merupakan besarnya ADD berdasarkan nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, kemiskinan pendidikan dasar, kesehatan dll), selanjutnya disebut alokasi dana des proporsional. Besarnya persentase perbandingan antara asas merata dan adil sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diatas, adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah ADD dan besarnya ADD adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.⁸⁰

Dari data yang dikumpulkan oleh penulis diketahui bahwa besaran alokasi dana desa berkisaran antara Rp.230.000.000 s/d 250.000.000 pertahun, sudah termasuk anggaran untuk aparatur desa, yang diberikan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, kemiskinan pendidikan dasar dan kesehatan.

Sedangkan untuk program untuk penggunaan alokasi dana desa di Kecamatan Gading Rejo yaitu lebih memprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur seperti, gorong-gorong, sumur bor pembangunan rabat beton, drainase, untuk bantuan operasional lembaga kemasyarakatan kegiatan pembinaan kemasyarakatan kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, kelompok tani, belanja pegawai, biayamusyawarah, kegiatan PKK, LPM dan sisanya untuk operasional desa yaitu alat tulis, perlengkapan kantor lainnya.

⁸⁰⁸⁰ Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalm Perspektif Hukum*, (Jakarta: RajawaliPers, 2009), Ed. Ke-1, h. 176

Pelaksanaan program alokasi dana desa di Kecamatan Gading Rejo ini program pengalokasian dana desa masing- masing desa hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur seperti balai desa dan gorong-gorong, pembuatan sumur bor dan tunjangan untuk aparatur desa, sedangkan prasarana yang lain belum tersentuh seperti pembangunan sanitasi (prilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih), yang dibutuhkan msyarakat belum ditangani dengan baik walaupun sudah ada di beberapa desa yang membangun wadah air bersih, tetapi itu pun masih sangat jauh dari kata mencukupi untuk kebutuhan masyarakat karena terkendala dengan dana ADD yang minim.

Selain terkendala dengan ADD yang kurang, dana yang diperoleh hanya difokuskan untuk operasional desa, belanja aparatur desa dan dan Badan Permusyawaratan Desa (BDP), ini untuk belanja aparatur desa sebesar 60% dan untuk kegiatan ekonomi hanya terlihat dari persentasi penggunaan alokasi dana desa antara 35% -45%.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pada pasal 19 disebutkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut: ⁸¹

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;

⁸¹Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 18

- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat Desa melalui badan usaha milik desa (BUMD).

Akan tetapi jika dilihat dari pelaksanaan alokasi dana desa di kecamatan gading rejo, tujuan program alokasi dana desa ini belum tersentuh secara menyeluruh. Dari tujuan ADD yang baru dirasakan oleh masyarakat yaitu pembangunan infrastruktur desa, dan peningkatan pengalaman nilai-nilai keagamaan sosial, ini terlihat dari program-program di desa yang di alokasikan untuk ibu-ibu PKK yang digunakan untuk pengajian seperti desa mataram, gading rejo utara, blita rejo, bulu rejo, yogyakarta, bulu kerto dan untuk pembangunan infrastrukturnya yaitu wonodadi, gading rejo, parerejo, tegalsari, wates timur, kediri, panjerejo, wates, tambah rejo, gading rejo timur, wates selatan, yogyakarta selatan. Peningkatan pendapatan desanya yaitu tambah rejo, wonosari.

Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa tujuan dari alokasi dana desa di Kecamatan Gading Rejo yang dapat dikatakan tercapai yaitu peningkatan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan pengalaman nilai-nilai keagamaan sosial budaya, sedangkan peningkatan pendapatan desa dan masyarakat belum tercapai secara menyeluruh. Karena terkendalanya dana yang kurang dan ketidak

sesuaian program yang disusun oleh pemerintah desa setempat. Aparatur desa belum memprioritaskan kegiatan ekonomi produktif sebagai salah satu program alokasi dana desa, aparatur desa lebih memprioritaskan pembangunan gorong-gorong, sumur bor dan sinitasi air bersih yang sangat kurang sehingga itu menjadi kebutuhan masyarakat setempat.

B. Dampak ADD Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat baik melalui program-program yang diadakan dan disusun oleh pemerintah, maupun kebutuhan dasar yang telah terpenuhi oleh usaha-usaha yang dilakukan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran tercapainya masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak sebagai indikator-indikatornya yaitu tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat pendapatan masyarakat, komposisi pengeluaran masyarakat, dan tingkat perumahan masyarakat, yang menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat dalam program ADD.⁸² maka berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat dari tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1 Indikator Kesejahteraan Sebelum Dan Sebelum Ada ADD dan Sesudah Ada ADD

Indikator	Sebelum ada ADD	Sesudah ada ADD	Keterangan
Tingkat pendidikan	50%	50%	Tidak Mengalami

⁸²Wujudji, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: P2LPTK, 1998). H. 31-42.

			Peningkatan
Tingkat kesehatan	Persalinan medis 95%	95%	Tidak Mengalami Peningkatan
Tingkat pendapatan masyarakat	Rp.1000.000- 1.500.000	Rp.1000.000- 1.800.000	Mengalami Peningkatan
Pengeluaran masyarakat	Rp.800.000	Rp.800.000	Tidak Mengalami Peningkatan%
Tingkat perumahan	60%	75%	Ada Peningkatan 15%
Pembangunan Infrastruktur	45%	90%	Mengalami Peningkatan 45%

Sumber: Data Primer Diatas Wawancara Dengan Kepala Desa Kecamatan Gading Rejo, 25 Juni 2018.⁸³

⁸³Hasil Wawancara Penulis Dengan Kepala Desa Kecamatan Gading Rejo, 25 Juni 2018.⁸³

Berdasarkan tabel diatas dilihat sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan agar cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri dengan tidak memerlukan bantuan orang lain.

masyarakat kecamatan gading rejo bila dilihat dari latar belakang pendidikan sudah menerapkan wajib belajar 9 tahun, bahkan ada masyarakat yang meneruskan kejenjang SMA, dan S1. Tetapi hampir 50 % masyarakat kecamatan gading rejo berpendidikan SMA.

Dampak adanya program ADD di kecamatan gading rejo pada bidang pendidikan belum dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar, dikarenakan pengalokasian dana tersebut belum dialokasikan kependidikan. Sekalipun program ADD tersebut belum dirasakan langsung oleh masyarakat namun tidak menjadikan masyarakat putus sekolah karena adanya bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu yang di berikan oleh pemerintah.

2. Tingkat Kesehatan

Kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara ekonomis. Indikator kesehatan yang menjadi komponen kesejahteraan yaitu terpenuhinya pangan, sandang, dan kesehatan sehari-hari.

Dari program alokasi dana desa untuk kesehatan yaitu pembuatan gorong-gorong dan sinitasi air bersih yang dilakukan dengan pembuatan gorong-gorong

tersebut sanitasi kesehatan akan lebih sehat dan telah mensejahterakan masyarakat ditingkatkan kesehatan.

Masyarakat Kecamatan Gading Rejo dalam pemenuhan gizi sudah tercukupi, hal ini terlihat dari kecukupan akan makan yang di konsumsi oleh masyarakat. Selain itu juga masyarakat kecamatan gading rejo dalam penanganan ibu melahirkan sudah sangat sedikit menggunakan tabib atau dukun bayi, sehingga angka kematian dan ibu melahirkan tidak ada.

Masyarakat Kecamatan Gading Rejo yang memiliki masalah kesehatan lebih memilih berobat kepuskesdes, puskesmas dan bidan. Serta pola makanan dan kebutuhan kalori terpenuhi dengan baik sehingga jarang ada warga yang sakit kekurangan asupan makanan.

3. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi. Kesehatan maupun pendidikan dan kebutuhan lainnya yang bersifat material. Menurut sistem kendali mutu program pertanahan, Agraria dan Tata Ruang (SKPMP) tingkat pendapatan perbulan dikatakan sejahtera adalah lebih dari Rp.500.000.

Adanya ADD ini tidak memberikan dampak positif terhadap pendapatan masyarakat, ini karena program ADD serta pengelolaan di kecamatan gading rejo kurang memiliki program pemberdayaan ekonomi, dimasyarakat kecamatan gading rejo ini hanya beberapa program pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa kelompok tani, kerajinan tangan oleh ibu PKK namun pengelolaannya

belum dikelola dengan baik sehingga secara ekonomi belum dapat memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Seharusnya dari program ADD digunakan untuk pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan pembuatan industri rumah tangga kreatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

4. Pengeluaran Masyarakat

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, maka semakin kecil proporsi pengeluaran untuk makan pada seluruh pengeluaran rumah tangga. Dapat dikatakan bahwa rumah tangga sejahtera bila presentase pengeluaran untuk non makanan atau <80% dari pendapatan.

Meskipun tingkat pendapatan masyarakat tidak menentu karena masyarakat di Kecamatan Gading Rejo mayoritas petani yang mengandalkan panen. Namun jika pendapatan mereka tinggi maka konsumsi dapat tercukupi dengan baik, akan tetapi jika pendapatan mereka semakin sedikit, maka hanya untuk kebutuhan pangan saja. Umumnya pengeluaran konsumsi berkisar Rp.20.000-30.000 perhari. Ini belum termasuk biaya pendidikan, kesehatan perumahan serta pajak bumi dan bangunan, kendaraan bermotor dan lain sebagainya.

5. Tingkat Perumahan Masyarakat

Menurut biro pusta statistik (BPJ), dikatakan perumahan yang dianggap sejahtera adalah luas lantainya lebih dari 10m² dan bagian terluas rumah bukan tanah, dan status penguasaan tempat tinggal milik sendiri.

Bentuk bangunan rumah tangga masyarakat kecamatan Gading Rejo sebesar 60% permanen dan 40% no permanen, dan status kepemilikan adalah milik sendiri, sedangkan MCK warga juga 60% yang memiliki sini tasi yang baik selebihnya hanya MCK seadanya. Kondisi sumber air minum (PDAM) tetapi masih belum mencukupi kebutuhan warga, ini terlihat dari pasokan air mingalir untuk warga setiap kampung berbeda-bed, keadaan penerangan 90% warga sudah menggunakan listrik, dan ekitar 105 warga belum memiliki KWH sendiri.

Apabila dilihat dari indikator perumahan, warga belum dikatakan sejahtera karena luas bangunan belum memenuhi kategori sejahtera. Beberapa indikator yang telah dijelaskan, telah menunjukkan bahwa ADD berdampak positif bagi masyarakat sekitar seperti tidak harus menggunakan air sungai lagi untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, sekalipun belum dapat terpenuhi 100% kebutuhan air bersih.

Jika dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan masyarakat yang ada, beberapa indikator kesejahteraan ini belum terpenuhi dengan baik, oleh program alokasi dana desa di Kecamatan Gading Rejo, hanya indikator tingkat kesehatan yang mengalami peningkatan cukup baik dari program alokasi dana desa ini seperti sudah ada program untuk saluran sinitasi dan pembuatan gorong-gorong sehingga masalah sinitasi menjadi lebih baik dan lebih sehat. Dan tingkat pendidikan masyarakat belum terlihat dampak positif dari program alokasi dana desa, karena program yang berhubungan dengan pendidikan masyarakat kecamatan Gading Rejo hampir 50% yang lulus SMA bahkan ada yang sampai keperguruan tinggi. Itu bukan karena program alokasi dana desa yang ada

dikecamatan gading rejo namun karena bantuan pendidikan yang digalakkan oleh pemerintah.

Sedangkan jika dilihat dari tingkat pendapatan masih belum dapat dikatakan sejahtera, oleh karena itu peran pengelolaan alokasi dana desa yang tepat sangat di nantikan oleh masyarakat demi perubahan kondisi ekonomi sehingga tercapailah kesejahteraan masyarakat.

C. Program Alokasi Dana Desa ADD Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam mengajarkan kita tentang perencanaan secara jelas terperinci dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber segala ilmu yang menjadi pedoman kita untuk menindak lanjuti berbagai macam permasalahan hidup, begitu pun dengan perencanaan. Sebagiman Allah SWT berfirman dalam (Q.S. Ar-Rad:11).⁸⁴

Pelaksanaan dan dampak program alokasi dana desa dikecamatan gading rejo dalam perspektif ekonomi islam tidak sesuai dengan QS. Ar-Rad ayat 11. Serta tidak menggunakan asas adil dalam pembagian proporsi ADD dikecamatan gading rejo karena terkendala dengan dana ADD yang minim. Selain terkendala denan ADD yang minim dana, yang diperoleh hanya di fokuskan kepada pembanguna fisik, untuk operasional desa, Belanja Aparatur Desa Dan Permusyawaratan Desa (BPD), ini untuk belanja aparatur desa sebesar 60% dan untuk kegiatan ekonomi hanya terlihat dari persentasi penggunaan alokasi dana desa antaraa 35%-45%. Selain terkendala dengan ADD, dana yang diperoleh hanya difokuskan pembangunan Infrastruktur seperti gorong-gorong yang masih

⁸⁴Departemen Agama RI, Al-Jamanatul' *Ali AlQur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:Cv Penerbit J-ART, 2004), H. 350

sangat kurang sedangkan itu menjadi kebutuhan masyarakat dikecamatan gading rejo namun ada beberapa desa yang mengalokasikan dana desa dengan baik yaitu desa tambah rejo, wonosari.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

berdasarkan hasil penelitian, analisis, pengelolaan data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pada pelaksanaan program alokasi dana desa di Kecamatan Gading Rejo dalam mendistribusikan ADD pembagian dana untuk setiap desanya di bagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi masing-masing desa. Pada pelaksanaan alokasi dana desa di kecamatan Gading Rejo ini ada beberapa desa yang kurang baik secara pelaksanaannya dikarenakan pembagian proporsi untuk masing-masing kegiatan belum terlaksana seperti kegiatan ekonomi produktif di karenakan minimnya biaya Alokai Dana Desa. Selain terkendala dengan dan ADD yang kurang, dana yang diperoleh hanya difokuskan untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan balai desa, sumur bor, gorong-gorong dan tunjangan untuk aparatur desa, sedangkan prasarana yang lain belum tersentuh, sehingga Aparatur desa belum memprioritaskan kegiatan ekonomi produktif sebagai salah satu program alokasi dana desa, aparatur desa lebih memprioritaskan pembangunan gorong-gorong, sumur bor, dan sinitasi air bersih yang sangat kurang sehingga itu menjadi kebutuhan masyarakat setempat.
2. Dampak program ADD terhadap kesejahteraan masyarakat di kecamatan gading rejo
Jika dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan masyarakat yang ada, beberapa indikator kesejahteraan ini belum terpenuhi dengan baik, oleh program alokasi dana desa di kecamatan gading rejo, hanya indikator tingkat kesehatan yang mengalami peningkatan cukup baik dari program alokasi dana desa ini seperti sudah ada program

untuk saluran sanitasi dan pembuatan gorong-gorong sehingga masalah sanitasi menjadi lebih baik dan lebih sehat. Dan tingkat pendidikan masyarakat belum terlihat dampak positif dari program alokasi dana desa, karena program yang berhubungan dengan pendidikan masyarakat kecamatan gading rejo hampir 50% yang lulus SMA bahkan ada yang sampai ke perguruan tinggi. Itu bukan karena program alokasi dana desa yang ada di kecamatan gading rejo namun karena bantuan pendidikan yang digalakkan oleh pemerintah.

Sedangkan jika dilihat dari tingkat pendapatan masih belum dapat dikatakan sejahtera, oleh karena itu peran pengelolaan alokasi dana desa yang tepat sangat di nantikan oleh masyarakat demi perubahan kondisi ekonomi sehingga tercapailah kesejahteraan masyarakat. Dari uraian tersebut dampak ADD di kecamatan gading rejo berdampak positif di bidang infrastruktur.

3. Program alokasi dana desa dalam peningkatan kesejahteraan di kecamatan gading rejo dalam perspektif ekonomi islam tidak sesuai dengan QS. Ar-Rad ayat 11. serta tidak menggunakan asas adil dalam pembagian proporsi ADD di kecamatan gading rejokarena terkendala dengan dana ADD yang minim. Selain terkendala dengan ADD yang minim dana, yang diperoleh hanya di fokuskan kepada pembangun fisik, untuk operasional desa, Belanja Aparatur Desa Dan Permusyawaratan Desa (BPD), ini untuk belanja aparatur desa sebesar 60% dan untuk kegiatan ekonomi hanya terlihat dari persentase penggunaan alokasi dana desa antara 35%-45%. Terutama di fokuskan kepada pembangunan infrastruktur gorong-gorong dan sumur bor karena itu yang sangat dibutuhkan masyarakat kecamatan gading rejo.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diajukan beberapa hal yang diharapkan bisa diterapkan yaitu:

1. Untuk pemerintah pusat agar dapat menambah dana ADD karena dana sangat minim untuk keperluan kecamatan gading rejo.
2. Untuk pemerintah daerah alangkah baiknya jika program alokasi dana desa tidak hanya mengarah pada pembangunan infrastruktur saja, penggalian potensi yang ada di masyarakat harus mulai dikembangkan atau dilaksanakan, agar masyarakat mampu berkembang contohnya pembuatan kelompok ekonomi kreatif sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk masyarakat setempat masyarakat desa untuk kedepannya harus memiliki kemauan untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk menggali potensi apa yang ada sehingga kedepannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta: Bee Media pustaka, 2015
- Abu Usman Abdurrahman, “*Perencanaan dalam Kaidah Islam*” (on-line) tersedia di: [http://ilamisione.owrdpress/2013/01/11/perencanaan dalam kaidah islam/](http://ilamisione.owrdpress/2013/01/11/perencanaan-dalam-kaidah-islam/) 14 Juni 2017
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi mikro ISLAM*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Akbar Prabawa, *pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa loalepu Kecamatan Tangerang Kabupaten Kutai Kartanegara*, Jurnal Umum Pemerintah, Vol . 3 NO. 228, Desember, 2015.
- Arifin P, Soeria, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum*, Jakarata: Rajawali Pers, 2009.
- Bahrudin, Rudy, *Ekonomi Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UUP STIM YKPN 2012.
- Bintaro, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Buku Besar Data Dalam Angka dan Kalimat BPS*, Teluk Betung, Lampung 2015.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Jamanatul’ Ali AlQur’an dan Terjemahannya*, Bandung: Cv Penerbit J-ART, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Farouk Muhammad, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PTIK Press, 2003.
- Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Hasil Wawancara Penulis Dengan Kepala Desa Kecamatan gading rejo, 25 Juni 2018.
- Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Jauadi, e-mail kepada penulis, 13 Juni 2018.
- Jauadi, Wawancara Dengan Penulis, Balai Desa, Bulu Rejo, 13 Juni 2018.

Kansil dan cristine, *Pemerintah Daerah Di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 ayat(1),

Lihat *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, pasal 10 ayat (3).

Loncolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, Yogyakarta, UUPSTIM YKPN, 2015.

Lukman Hakim, 2012, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga.

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Mandhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996

M. Suherman, Aparatur Desa Kecamatan Gading Rejo, Wawancara dengan Penulis,

Malayu S.P. Hasibun, *Manajemen Dasar pengertian dan masalah* , Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015

Mubyarto, *Reformasi Sistem Ekonomi* , Yogyakarta: UII PRESS, 2000.

Nurul Huda, *Ekonomi Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta : Kencana, 2009.

Pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) (Selat panjang)

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa, 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Nomor 16 Tahun 2011, Pasal 25

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Rudi Badarudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UUPSTIM YKPN, 2012.

Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI dan Bina Grafika, 1999.

Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Makro*, Jakarta: LP3ES, 1982.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) point (d).

W.J.S. Purwadinata, *Pengertian Kesejahteraan Manusia*, Bandung: Mizan, 1995.

Wujadji, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: P2LPTK, 1998.

Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta : Gema Insani Press, 1998.

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Zulganef, *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.



PEDOMAN WAWANCARA

Karakteristik Responden

Nama :

Jenis kelamin :

Jabatan :

Umur :

1. Bagaimana profil kecamatan gading rejo ?
2. Bagaimana letak demografis kecamatan gading rejo ?
3. Berapa jumlah penduduk kecamatan gading rejo ?
4. Berapa jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin ?
5. Berapa jumlah penduduk berdasarkan agama ?
6. Berapa jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan ?
7. Berapa jumlah fasilitas kesehatan di kecamatan gading rejo ?
8. Apa saja mata pencarian masyarakat kecamatan gading rejo ?
9. Bagaimana kondisi masyarakat kecamatan gading rejo dari segi pendapatan, pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal / rumah ?

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas responden

Nama :

Umur :

Pendidikan terakhir :

Alamat :

1. Berapa jumlah desa yang akan dialokasikan dana desa di kecamatan gading rejo ?
2. Program alokasi dana desa apa saja yang akan dilakukan pemerintah desa di kecamatan gading rejo?
3. Apakah program alokasi dana desa dikecamatan gading rejo sudah sesuai dengan dasar hukum alokasi dana desa?
4. Apakah program alokasi dana desa dikecamatan gading rejo sudah mengacu pada asas merata dan adil?
5. Apakah program alokasi dana desa di kecamatan gading rejo sudah mncapai tujuannya?
6. Apakah program alokasi dana desa ini dapat membantu mensejahterakan masyarakat kecamatan gading rejo ?
7. Apakah program alokasi dana desa di kecamatan gading rejo sudah mencapai kesejahteraannya dapat dilihat dari indikator kesejahteraan yaitu pendidikan, kesehatan pndapatn pengeluaran, dan tingkat perumahan masyarakat?
8. Adakah dampak sebelum dan sesudah adanya alokasi dana desa?
9. Apa yang menjadi penghambat dalam melakukan program alokasi dana desa dikecamatan gading rejo ?

10. Dengan adanya alokasi dana desa program apakah yang diutamakan oleh pemerintah daerah dikecamatan gading rejo?
11. Bagaimana partisipasi masyarakat setelah adanya alokasi dana desa dikecamatan gading rejo ?
12. Setelah adanya alokasi dana desa, Upaya apa yang dilakukan pemerintah setempat dalam mensejahterakan masyarakat desa kecamatan gading rejo ?
13. Adakah peningkatan kesejahteraan sebelum dan sesudah adanya lokasi dana desa dikecamatan gading rejo ?
14. Apakah pelaksanaan alokasi dana desa dikecamatan gading rejo terlaksana sesuai dengan program yang telah di rencanakan ?
15. Tingkat kesejahteraan seperti apa yang dirasakan masyarakat setempat setelah adanya alokasi dan desa ?
16. Bagaimana pertanggung jawaban pemerintah daerah kecamatan gading rejo terhadap pengelolaan alokasi dana desa dikecamatan gading rejo ?
17. Apakah program alokasi dana desa dikecamatan gading rejo sudah sesuai dengan perspektif ekonomi islam?



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endero Suratmin, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Sukarame, Bandar Lampung

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Napsia
NPM : 1451010222
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2017 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Prengsewu)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 7 November 2018

**Napsia
NPM.1451010222**